

# LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Anggaran

Tahun 2016



Kementerian Keuangan  
Direktorat Jenderal Anggaran



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.   LATAR BELAKANG.....	2
B.   TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C.   PERAN STRATEGIS.....	4
D.   SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
A.   RENCANA STRATEGIS.....	7
B.   PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....	8
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>11</b>
A.   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B.   REALISASI ANGGARAN.....	50
C.   KINERJA LAIN-LAIN.....	51
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A.   KEBERHASILAN.....	56
B.   STRATEGI.....	56
<b>LAMPIRAN</b>	
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DJA TAHUN 2016	



## PENGANTAR

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJA tahun 2016 telah mencapai 107,32%.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Anggaran(DJA) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi DJA pada Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIN DJA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, LAKIN DJA Tahun 2016 ini disusun mengacu Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2016 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-20/AG/2015.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJA adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran DJA tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

Selama tahun 2016 DJA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis DJA Tahun 2016 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja DJA Tahun 2016 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN DJA ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian

IKU tahun 2016 dengan kontrak kinerja tahun 2016, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh DJA.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan anggaran negara dirasakan semakin penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi “memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”, aparatur DJA senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi DJA.

Direktur Jenderal Anggaran



Askolani 

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari 20 IKU yang ditetapkan, 19 berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus abu-abu, yaitu IKU "Implementasi sistem *reward and punishment*".

Laporan Kinerja DJA, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DJA atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu kepada Rencana Strategis DJA Tahun 2015-2019.

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi perekonomian nasional yang cepat dan dinamis, DJA telah menetapkan **Visi DJA** yaitu **"Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJA mempunyai lima misi yaitu (1) memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan; (2) menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan; (3) mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses; (4) terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran; serta (5) membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

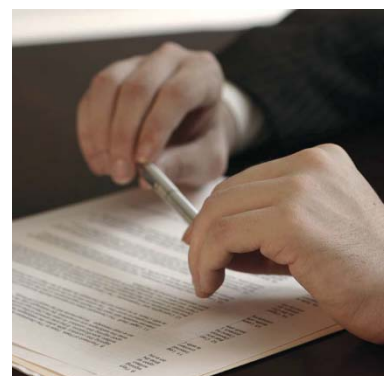
Dalam mencapai visi dan misi, DJA menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan dan strategi DJA dalam Rencana Strategis DJA tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan membangun sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi DJA berdasarkan sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 3 (tiga) sasaran strategis pada *customer perspective*, 4 (empat) sasaran strategis pada *internal process* dan 4 (empat) sasaran strategis *learning and growth perspective*.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran yang berkualitas,
2. Pemenuhan layanan publik,
3. Sistem pelayanan PNBP yang optimal,
4. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi,
5. Harmonisasi Kebijakan penganggaran yang berkualitas,
6. Penyusunan anggaran yang akurat,
7. Sistem penganggaran yang optimal,
8. Monitoring dan evaluasi yang efektif,
9. SDM yang kompetitif,
10. Organisasi yang kondusif,
11. Sistem manajemen informasi yang handal, dan
12. Pengelolaan anggaran yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2016 telah dihasilkan 20 IKU pada level Direktorat Jenderal yang merupakan komitmen kinerja Direktur Jenderal Anggaran. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2016 sudah memuaskan. Dari 20 IKU yang ditetapkan oleh DJA, 19 diantaranya berstatus hijau dan satu IKU berwarna abu-abu.

Disamping memfokuskan pencapaian target-target kinerja, DJA juga melaksanakan target-target pekerjaan lain di luar IKU. Selama tahun 2016 terdapat beberapa keberhasilan pelaksanaan tugas (diluar IKU) yang cukup menonjol, antara lain pelaksanaan Pemilihan Pegawai terbaik DJA 2016, Lomba Inovasi 2016, Lomba Film dan Poster Nilai-Nilai Kemenkeu dan Program Budaya Antikorupsi, serta launching beberapa inovasi yang siap diimplementasikan.



# BAB I



## PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

B. PERAN STRATEGIS

C. SISTEMATIKA LAPORAN

## A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJA dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja(LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJA dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJA. LAKIN DJA sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJA, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja DJA. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

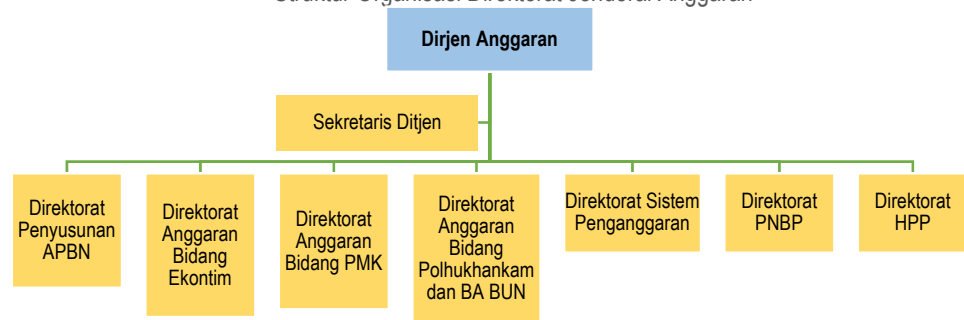
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa DJA adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentral dari peran DJA tersebut terletak pada tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran.

Adapun struktur organisasi DJA terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

**Gambar 1.1**  
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran



### C. PERAN STRATEGIS

DJA mempunyai peran strategis yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran serta melaksanakan pemungutan pendapatan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peran ini sangat strategis mengingat kedua fungsi tersebut merupakan fungsi Menteri Keuangan selaku *Chief of Financial Officer* (CFO) yang salah satu fungsinya adalah menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN serta melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan undang-undang.

Guna mewujudkan penganggaran yang berkualitas, DJA melaksanakan kegiatan pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, penyusunan APBN, serta pengembangan sistem penganggaran. Dari sisi pelaksanaan pemungutan PNBPN, DJA melaksanakan kegiatan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) serta subsidi.

Peran tersebut sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai pemerintah melalui agenda prioritas Nawa Cita yang salah satunya adalah “Mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik”. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan melakukan upaya penguatan kapasitas fiskal negara. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja. Guna mendukung upaya pencapaian sasaran Nawa Cita tersebut, DJA melaksanakan upaya peningkatan PNBPN melalui pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

handal serta peningkatan kualitas belanja melalui perencanaan anggaran yang berkualitas.

Upaya tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk perubahannya;
- b. Pengalokasian anggaran Kementerian/ Lembaga;
- c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Penghitungan *resource envelope* untuk penetapan pagu anggaran;
- e. Penetapan Pagu Indikatif, Pagu Sementara dan Pagu Definitif;
- f. Penetapan perubahan pagu anggaran bagi K/L terkait; dan
- g. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penganggaran.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJA Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### C. Kinerja Lainnya

### 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### 5. Lampiran

Formulir Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja DJA Tahun 2016

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA



## A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, DJA telah menetapkan visi yaitu:

**“Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJA mempunyai lima **misi DJA** yaitu:

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan;
2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
3. Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses;
4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran; dan
5. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

Sesuai dengan Rencana Strategis DJA, telah ditetapkan tujuan lima tahun ke depan dari tahun 2015 – 2019 yang menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam mencapai visi dan misi, DJA menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan dan strategi DJA dalam Rencana Strategis DJA tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan membangun sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.

Tujuan DJA untuk periode 2015-2019 tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) tema pokok sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL);
3. Penyusunan Rancangan APBN;
4. Pengelolaan PNBP dan Subsidi;
5. Pengembangan Sistem Penganggaran;
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA; dan
7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

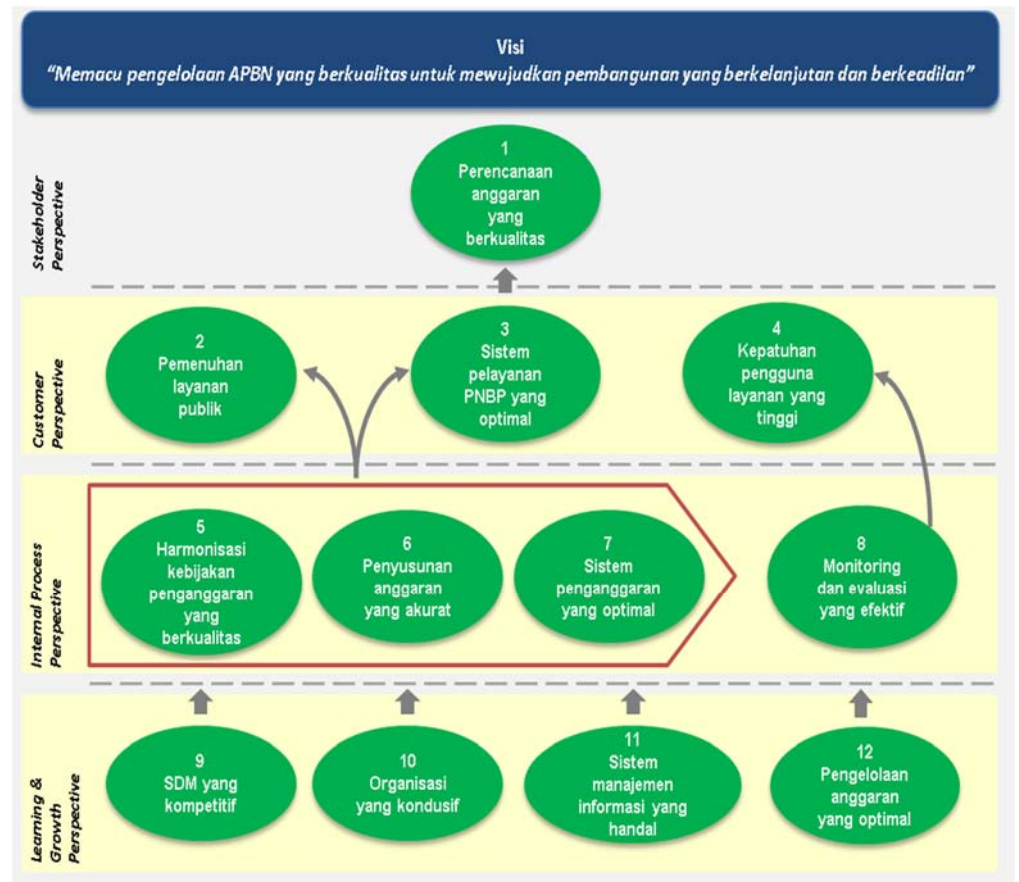
## **B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka menyusun strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, DJA juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu.

Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKU yang merupakan turunan dari IKU atasan.

Pada tahun 2016, DJA menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen penetapan kinerja. Kontrak kinerja pejabat eselon I dan II berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customers*, *internal process* dan *learning & growth*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

**Gambar 2.1**  
Peta Strategi Direktorat Jenderal Anggaran



Peta Strategi DJA 2016 memuat 12 Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran yang berkualitas,
2. Pemenuhan layanan publik,
3. Sistem pelayanan PNPB yang optimal,
4. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi,
5. Harmonisasi Kebijakan penganggaran yang berkualitas,
6. Penyusunan anggaran yang akurat,
7. Sistem penganggaran yang optimal,
8. Monitoring dan evaluasi yang efektif,
9. SDM yang kompetitif,
10. Organisasi yang kondusif,
11. Sistem manajemen informasi yang handal, dan
12. Pengelolaan anggaran yang optimal.

Dari 12 Sasaran Strategis tersebut ditetapkan pula 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target masing-masing IKU selama 2016 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu *One* Direktorat Jenderal Anggaran

Target Indikator  
Kinerja Utama (IKU)  
Kemenkeu One  
Direktorat Jenderal  
Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	1a-CP	Akurasi perencanaan APBN	95%
2.	Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06
3.	Sistem pelayanan PNBPN yang optimal	3a-N	Persentase implementasi <i>single source database</i> PNBPN	38%
4.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	95%
		4b-N	Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80
5.	Harmonisasi Kebijakan penganggaran yang berkualitas	5a-N	Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran	83%
		5b-N	Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75%
		5c-N	Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	100%
6.	Penyusunan anggaran yang akurat	6a-CP	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5%
		6b-N	Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,5
7.	Sistem penganggaran yang optimal	7a-N	Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%
		7b-N	Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100
		7c-N	Penyelesaian implementasi RKA-K/L online	70%
8.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	52%
		8b-N	Implementasi penerapan sistem reward dan punishment berbasis kinerja	N/A
9.	SDM yang kompetitif	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89%
10.	Organisasi yang kondusif	10a-CP	Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%
11.	Sistem manajemen informasi yang handal	11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%
		11b-N	Implementasi E-government services	100%
12.	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAIN-LAIN



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja DJA tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJA adalah sebesar **107,23**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

- Stakeholders perspective* dengan bobot 25 %, capaian kinerja **101,82**
- Customers perspective* dengan bobot 15 %, capaian kinerja **105,10**
- Internal process perspective* dengan bobot 30%, capaian kinerja **110,13**; dan
- Learning and growth perspective* dengan bobot 30 %, capaian kinerja **109,89**

Selama tahun 2016, dari 20 IKU DJA, terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus abu-abu.

Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
Capaian IKU Kemenkeu *One* DJA Tahun 2016

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>				101,82
<b>1</b>	<b>Pengelolaan anggaran yang berkualitas</b>			101,82%
1a - CP	Akurasi perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82
<b>Customer Perspective (15%)</b>				105,10
<b>2</b>	<b>Pemenuhan layanan publik</b>			103,45%
2a - CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06	4,2	103,45
<b>3</b>	<b>Sistem pelayanan PNBPN yang optimal</b>			100,00%
3a - N	Persentase implementasi <i>Single Source Database</i> PNBPN	38%	38%	100%
<b>4</b>	<b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi</b>			111,86%
4a - N	Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	95%	100%	105,26
4b - N	Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80	93,37	116,71
<b>Internal Process Perspective (30%)</b>				110,13
<b>5</b>	<b>Kebijakan penganggaran yang berkualitas</b>			106,67%
5a-N	Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran	83%	108,46%	120,00%

Capaian IKU  
Kemenkeu *One*  
DJA Tahun 2016

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
5b-N	Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75%	75%	100,00%
5c-N	Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	83%	108,46%	120,00%
<b>6</b>	<b>Penyusunan perencanaan anggaran yang akurat</b>			120,00%
6a-CP	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5%	2,63%	120,00%
6b-N	Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,5	8,83	120,00%
<b>7</b>	<b>Sistem penganggaran yang optimal</b>			105,92%
7a-N	Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100,00%
7b-N	Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100	114,31	114,31%
7c-N	Penyelesaian implementasi RKA-K/L online	70%	72,41%	103,44%
<b>8</b>	<b>Monitoring dan evaluasi yang efektif</b>			109,14%
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13%	107,94%
8b-N	Implementasi sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	N/A	N/A	N/A
<b>Learning and Growth Perspective (30%)</b>				109,14%
<b>9</b>	<b>SDM yang kompetitif</b>			111,26%
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89%	99,02%	111,26%
<b>10</b>	<b>Organisasi yang kondusif</b>			114,94%
10b-CP	Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94%
<b>11</b>	<b>Sistem informasi manajemen yang terintegrasi</b>			110,00%
11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%	0,06%	120,00%
11b-N	Implementasi <i>E-government services</i>	100%	100%	100,00%
<b>12</b>	<b>Pengelolaan anggaran yang optimal</b>			100,35%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,33%	100,35%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>107,00</b>

## 1. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Kebijakan penganggaran merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, kebijakan yang diterbitkan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik mengacu kondisi perekonomian terkini guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran Strategis Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas terdiri atas IKU Akurasi Perencanaan APBN dengan rincian target dan realisasi IKU sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
Capaian Sasaran Strategis Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
1	<b>Pengelolaan anggaran yang berkualitas</b>			101,82
1a - N	Akurasi perencanaan APBN	95,00%	96,73	101,82

Capaian asaran Strategis Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Pengelolaan anggaran yang berkualitas	Rp 187.155.000,-	Rp137.491.438,-	73,46%

## 1a-CP Akurasi Perencanaan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Perencanaan APBN yang berkualitas merupakan tujuan utama dari siklus penganggaran yang berawal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kualitas pengelolaan anggaran negara dapat diukur melalui perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel *I-account*.

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan APBN, DJA menetapkan IKU "Akurasi Perencanaan APBN". Tingkat akurasi perencanaan APBN adalah kesesuaian atau ketepatan antara angka *exercise* DJA yang disusun

berdasarkan formula yang ditetapkan dan masukan-masukan dari *stakeholders* terkait. IKU ini mengukur akurasi perencanaan APBN yang terdiri atas:

1. Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Perencanaan Belanja Pemerintah Pusat; dan
3. Perencanaan Pembiayaan.

IKU ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\left[ \left( \frac{\text{Perencanaan PNBP}}{\text{Realisasi PNBP}} \right) \times 25\% \right] + \left[ \left( \frac{\text{Perencanaan Belanja Pusat}}{\text{Realisasi Belanja Pusat}} \right) \times 50\% \right] + \left[ \left( \frac{\text{Perencanaan Pembiayaan}}{\text{Realisasi Pembiayaan}} \right) \times 25\% \right]$$

Guna meningkatkan tingkat akurasi dalam perencanaan APBN ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp187.155.000,- untuk evaluasi penganggaran belanja K/L dalam rangka penyusunan proyeksi APBN. Adapun realisasi atas pembiayaan pencapaian IKU ini sebesar Rp137.491.438,- (73,46%).

Selanjutnya, rincian atas capaian IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
Capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN

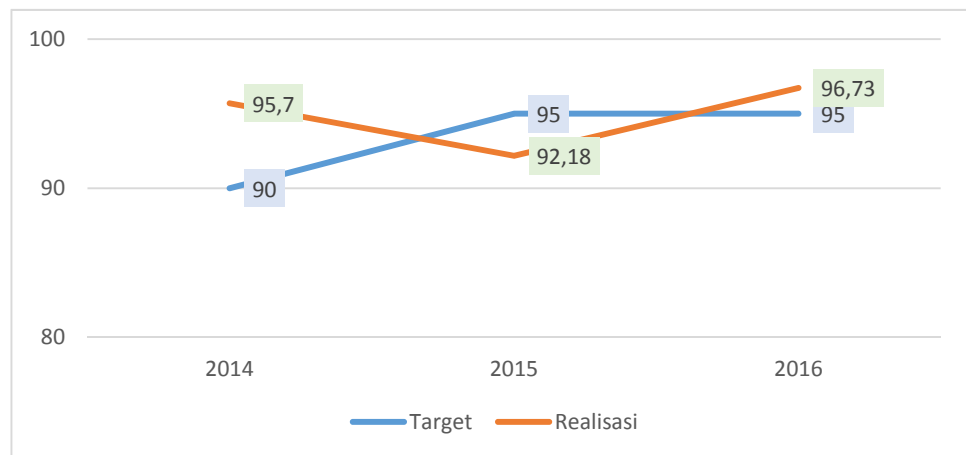
Capaian IKU Akurasi  
Perencanaan APBN

URAIAN	PNBP	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	PEMBIAYAAN
Realisasi s.d. 31 Desember 2016	262,3T	1.148,6T	330,3T
Pagu APBNP 2016	260,7T	1.195,2T	315T
Tingkat Akurasi	99,37%	96,10%	95,35%
Bobot perhitungan	25%	50%	25%
Nilai	24,84%	48,05%	23,84%
Realisasi IKU	<b>96,73%</b>		
Target IKU	95,00%		
Indeks capaian IKU	101,82		

IKU Akurasi Perencanaan APBN tahun 2016 berhasil memperoleh capaian sebesar 96,73%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95,00%. IKU ini tergolong sangat menantang karena capaian atas IKU ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pemerintah. Namun demikian, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2016 sehingga deviasi IKU tersebut dapat diminimalisasi, antara lain :

1. Monitoring secara intensif pelaksanaan APBN 2016 dan menyusun opsi-opsi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan APBN.
2. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2016, yaitu pertemuan bulanan *Asset Liability Management* (ALM), pertemuan bulanan/mingguan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Teptra), dan pertemuan bulanan/mingguan *Cash Planning Information Network* (CPIN).
3. Melakukan penyusunan analisis sensitivitas APBN 2016 terhadap asumsi dasar ekonomi makro.
4. Melakukan konsolidasi supporting belanja pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk *cross check* dengan pergerakan *I-account*

**Grafik 3.1**  
Perkembangan IKU Akurasi perencanaan APBN



Perkembangan IKU  
Akurasi perencanaan  
APBN

Pada tahun mendatang, upaya DJA untuk dapat mencapai tingkat akurasi pada batas yang telah ditetapkan antara lain melalui kebijakan pengamanan APBN TA 2017 dari sisi belanja dan kebijakan monitoring dan evaluasi serta pengamanan APBN 2017.

## 2. Pemenuhan Layanan Publik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Publik diturunkan menjadi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ini mengukur nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan DJA terhadap pihak eksternal, yaitu:

- Pelayanan Penyelesaian Surat Pengesahan DIPA;
- Pelayanan Penyelesaian Revisi Anggaran di DJA;
- Pelayanan Penyelesaian Standar Biaya Keluaran (SBK);
- Sistem Penerimaan PNPB Online (SIMPONI).

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Pemenuhan layanan publik	Rp 192.325.000,-	Rp107.325.000,-	56,05%

**Tabel 3.4**

Capaian Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Publik

Capaian Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Publik

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
3	Pemenuhan layanan publik			
3a - N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4.06	4,20	103,45

2a-CP

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu yang dinilai oleh pihak eksternal. Data capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen

yang dikoordinasikan oleh Biro Organta. Lingkup survei adalah pelanggan atas seluruh layanan unggulan DJA kepada pihak eksternal.

Dari hasil survei kepuasan pengguna layanan DJA tahun 2016 yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat diinformasikan bahwa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJA pada tahun 2016 memperoleh skor **4,20** (skala 5). Adapun jenis layanan yang disurvei untuk DJA tahun 2016 sebanyak 4 (empat) layanan unggulan dengan indeks kepuasan masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Skor Kepuasan Pengguna Layanan DJA Menurut Jenis Layanan

Skor Kepuasan  
Pengguna Layanan DJA  
Menurut Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Indeks
1	Layanan Penyelesaian Usulan Standar Biaya Khusus (SBK)	36	4,13
2	Layanan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	49	4,30
3	Layanan Penyelesaian Revisi DIPA non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (non APBN-P)	52	4,24
4.	Layanan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)	33	4,04
<b>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJA 2016</b>			<b>4.20</b>
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu 2016			4,19

Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,06 (indeks capaian 103,44)

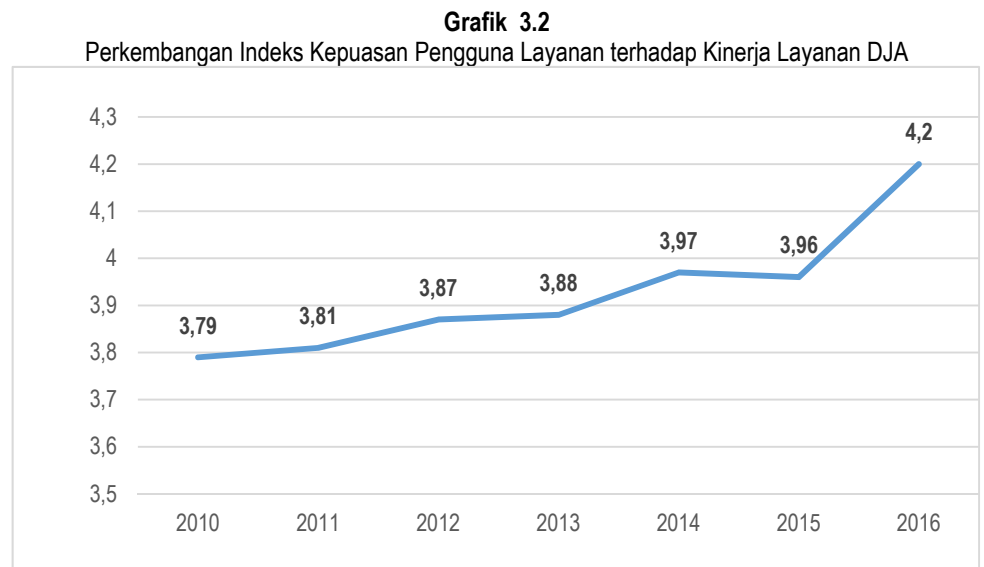
Pada tahun 2016, DJA telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan DJA, antara lain:

1. Membuat rancangan aplikasi untuk mempermudah mitra kerja (K/L) dalam pengajuan usulan revisi DIPA secara daring dan pembuatan monitoring proses penyelesaian usulan revisi.
2. Menyelenggarakan forum “DJA Mendengar” yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari Kementerian/Lembaga terkait layanan yang diberikan oleh DJA.
3. Perbaikan SOP Layanan Unggulan, diantaranya adalah:
  - a. SOP Penyelesaian Usulan SBK yang berlaku untuk satu K/L tertentu.
  - b. SOP Pembahasan Revisi Anggaran pada DJA
  - c. SOP RPP Jenis dan Tarif PNBPN dan SOP SIMPONI

SOP-SOP dimaksud menyederhanakan proses bisnis untuk beberapa jenis layanan DJA.

- Melakukan revisi atas Perdirjen No. PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PNPB dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik. Telah ditetapkan Perdirjen No.PER-6/AG/2016 pada tanggal 27 2016.

Perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Kinerja Layanan DJA



Guna mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp192.325.000,- dalam rangka penyelenggaraan DJA Mendengar. Adapun realisasi atas pembiayaan pencapaian IKU ini sebesar Rp107.325.000,- (56,05%).

Pada tahun 2017, DJA akan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan DJA melalui perbaikan SOP Layanan Unggulan, pembuatan maklumat layanan, dan pembuatan sistem monitoring proses penyelesaian layanan unggulan di DJA.

3.

**Sistem pelayanan PNPB yang optimal**

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), DJA secara terus menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara guna mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah perbaikan sistem administrasi ditempuh melalui penerapan implementasi *single source database* PNBP dengan cara mengimplementasikan SIMPONI dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi K/L atau pihak terkait lainnya.

Implementasi *single source database* PNBP diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran. Selain itu, K/L memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara *realtime* sesuai kewenangannya.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Sistem Pelayanan PNBP yang optimal	Rp 1.022.106.000,-	Rp845.643.600,-	82,73%

Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Persentase Implementasi *Single Source Database* PNBP dengan rincian target dan realisasi IKU sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
Capaian Sasaran Strategis Sistem pelayanan PNBP yang Optimal

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
2	Sistem Pelayanan PNBP yang optimal			120
3a- N	Persentase Implementasi <i>Single Source Database</i> PNBP	38%	38%	120

Capaian Sasaran Strategis Sistem pelayanan PNBP yang Optimal

IKU ini mengukur Persentase Implementasi *Single Source Database* PNBP yang terdiri atas:

1. Integrasi sistem pelayanan PNBP di K/L BUMN (sistem);
2. Terbentuknya database SDA Non Migas (perusahaan); dan
3. Monev capaian kinerja satker penyeter PNBP (satker).

3a-N

Persentase Implementasi *Single Source Database* PNBP

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Sistem Pelayanan PNBP yang optimal	Rp 192.325.000,-	Rp107.325.000,-	56,05%

Selanjutnya, untuk menghitung capaian IKU ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
Capaian IKU Persentase Implementasi *Single Source Database* PNBP

Alat Ukur	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Porsi Capaian Tahun 2016	Bobot	Skor	
A	Integrasi sistem pelayanan PNBP di K/L dan BUMN (sistem)	10	10	33%	0,60	20,0%
B	Terbentuknya database SDA nonmigas (perusahaan)	1.930	1.930	48%	0,30	14,5%
C	Monev capaian kinerja satker penyeter PNBP (satker)	700	700	35%	0,10	3,5%
<b>Capaian IKU</b>						<b>38,0%</b>

Capaian IKU Implementasi *Single Source Database* PNBP

Untuk mencapai IKU ini, pada tahun 2016 DJA telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan revisi atas Perdirjen No. PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik. Telah ditetapkan Perdirjen No.PER-6/AG/2016 pada tanggal 27 2016.
2. Mengintegrasikan sistem pelayanan PNBP di K/L dan BUMN. Sampai tahun 2016 terdapat 10 sistem yang telah terintegrasi yaitu: Bina Karantina Pertanian (Barantan), Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan (Binfar), Kem. Perhubungan, Ditjen HKI dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kem. Hukum dan HAM, BPN, Bappeten, Ditjen Imigrasi, BPOM, dan Ditjen Binapenta Kemenaker.
3. Membentuk *database* SDA Nonmigas. Sampai tahun 2016 sebanyak 1.930 perusahaan telah terbentuk database-nya.
4. Mempercepat proses interkoneksi antar sistem dengan Kementerian/Lembaga.
5. Menyelenggarakan sosialisasi SIMPONI kepada wajib bayar sektor SDA, khususnya SDA Non Migas di sektor Minerba.
6. Sosialisasi SIMPONI kepada Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar .

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran untuk koordinasi monitoring dan evaluasi SIMPONI yang telah terintegrasi dengan Modul Penerimaan Negara Generasi 2(MPN G-2) sebesar Rp1.022.106.000,-. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp845.643.600,- (82,73%).

Pada tahun mendatang, untuk mendukung pencapaian IKU ini DJA akan melaksanakan beberapa rencana aksi dalam rangka meningkatkan persentase implementasi single source database PNBP salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga & SDA Non Migas.

#### **4. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi**

Sebagai pengelola anggaran negara, DJA memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam bidang penganggaran. Untuk itu, DJA berkepentingan agar setiap peraturan dan kebijakan di bidang penganggaran yang diinisiasi langsung DJA dapat dipatuhi dan diimplementasikan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mewujudkan hal di atas, disusunlah Sasaran Strategis yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Sasaran Strategis ini diterjemahkan dalam IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program dan IKU Persentase Satker yang Menyampaikan Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi	Rp 1.074.409.000,-	Rp 868.944.800,-	82,73%

**Tabel 3.8**

Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi

Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi

Kode SS/IK U	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
4	<b>Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>			
4a - N	Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	95,00%	<b>100,00%</b>	105,26
4b - N	Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80	<b>93,37%</b>	116,71

4a-N

**Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program**

Sesuai amanat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) pengelolaan keuangan negara sejak tahun 2005 mengalami perubahan yang cukup mendasar. Terutama di sisi pendekatan penganggarannya yaitu penerapan anggaran terpadu, pendekatan penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja. Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas belanja negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Hal tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam sebuah prakiraan maju. Dalam prakteknya, KPJM berisi proyeksi pengeluaran untuk tahun berikutnya, sebagai bentuk penuangan rencana fiskal tahunan, yang disertai dengan prakiraan maju tiga tahun berikutnya (sebagai dasar proyeksi jangka menengah).

Dalam rangka mengimplementasikan harapan tersebut, IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program diharapkan dapat mengawal maksud reformasi di bidang penganggaran. IKU ini disusun untuk mengukur kepatuhan penanggung jawab program dalam menyusun rencana kerja pemerintah jangka menengah sebagaimana yang dituangkan ke dalam aplikasi RKA-K/L. Untuk mengukur tingkat capaian IKU ini, ditetapkan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program} = \frac{\sum \text{Penanggung jawab program yang mengisi alokasi pada kolom KPJM}}{\sum K/L}$$

Realisasi IKU ini pada tahun 2016 yaitu **100,00%** dari target 95,00% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 105,26 dengan rincian masing-masing persentase capaian per unit adalah sebagai berikut:

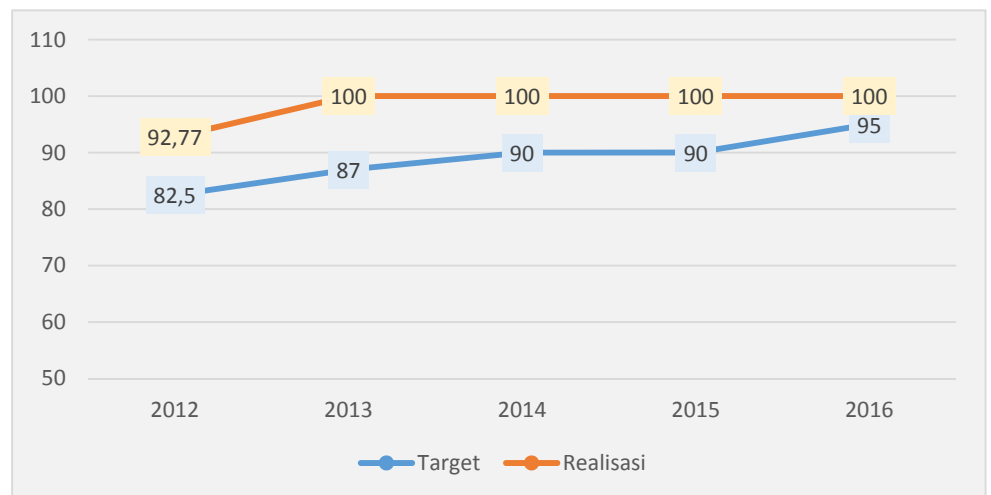
**Tabel 3.9**  
Capaian IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

Capaian IKU  
IKU Persentase  
Penyusunan KPJM  
oleh Penanggung  
Jawab Program

No	Unit	Penanggung jawab Program yang telah mengisi KPJM
1	Dit. Abid Ekontim	100%
2	Dit. Abid PMK	100%
3	Dit. Abid Polhukhankam & BA BUN	100%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Perkembangan  
Indeks Persentase  
penyusunan KPJM  
oleh Penanggung  
Jawab Program

**Grafik 3.3**  
Perkembangan Indeks Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program



Pada tahun 2016, seluruh penanggung jawab program atau unit eselon I di setiap K/L telah menyusun RKA-K/L atau DIPA 2017 termasuk KPJM dengan memperhitungkan alokasi *multiyears*. Disamping itu, telah dilaksanakan forum penelaahan antara DJA dan penanggung jawab program guna meminimalisir anomali dalam KPJM, serta dilakukan perbaikan pada RKA-K/L atau DIPA 2017.

Salah satu upaya yang dilaksanakan DJA dalam rangka mencapai target IKU ini adalah melalui *workshop* dengan tema “Perbaikan Kualitas Kerangka Pengeluaran Jangka menengah” pada tanggal 13 Oktober 2016 yang dihadiri seluruh K/L.

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka bimtek ke K/L dengan tema KPJM sebesar Rp282.650.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp279.260.000,- (98,80%)

Pada masa mendatang, DJA telah menetapkan beberapa rencana aksi dalam rangka mencapai IKU ini diantaranya melalui asistensi atas KPJM yang disusun K/L dalam RKA-K/L pada saat penelaahan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi melalui perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan *top down* dalam menetapkan baseline
2. Penggunaan output standar
3. Pemetaan struktur data yang terintegrasi

IKU “Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L” mengukur kualitas pengisian capaian kinerja oleh satker melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebagai alat monitoring capaian kinerja pada setiap K/L yaitu:

- a. kualitas data baik, tidak ada data anomali atas pengisian capaian kinerja
- b. pengisian capaian kinerja sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun

Untuk mengukur tingkat capaian IKU ini, ditetapkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rata-rata Satker yang menginput capaian kinerja melalui Aplikasi SMART per K/L}}{\sum \text{K/L}}$$

$$\sum \text{K/L}$$

Pada tahun 2016, untuk mencapai target IKU ini, DJA telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Implementasi validasi & modul monitoring di aplikasi sesuai formulasi dari proses bisnis
2. Sosialisasi aplikasi SMART
3. Monitoring oleh pemilik proses bisnis.
4. Integrasi SMART dan OM SPAN
  - Penyesuaian mekanisme penarikan data aplikasi SMART dari SPAN dengan metode *data interchange*, sehingga aplikasi SMART dan OM-SPAN tidak lagi memiliki perbedaan data finansial.
  - Telah dibangun *user-interface* agar user SMART dan OM-SPAN dapat sign-in ke kedua aplikasi dimaksud melalui satu halaman web (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id/spoc/>).
  - Tautan ke halaman web dimaksud telah pula di tampilkan pada website anggaran (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>)
5. Pengembangan Aplikasi SMART

4b-N

**Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L**

- Penambahan menu pengelompokan anggaran guna melaksanakan arahan Presiden dalam sidang kabinet terkait pengelompokan anggaran.
- Telah dibangun satu layer user level kantor wilayah (kanwil) DJPB.
- Telah dibangun user layer kanwil untuk Kementerian/ Lembaga selain Kementerian Keuangan yang memiliki satker banyak

Pada tahun 2016, rata-rata persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari 87 K/L sebesar **93,37%** dari target sebesar 80,00% (indeks capaian 116,71) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

Daftar Partisipasi Penyampaian Capaian Kinerja RKA-K/L Kementerian Lembaga tahun 2016

Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Satker	Jumlah Partisipasi Satker Tahun 2016	Partisipasi Satker Tahun 2016
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2	2	100,00%
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2	2	100,00%
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	71	71	100,00%
005	MAHKAMAH AGUNG	1657	1653	99,76%
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	521	521	100,00%
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	14	14	100,00%
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	817	813	99,51%
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	144	143	99,31%
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	454	332	73,13%
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1118	1094	97,85%
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1099	1049	95,45%
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1103	986	89,39%
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	130	121	93,80%
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	30	30	100,00%
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	620	307	49,52%
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	383	331	89,95%
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423	414	98,57%
025	KEMENTERIAN AGAMA	7026	5572	79,31%
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	394	394	100,00%
027	KEMENTERIAN SOSIAL	306	266	86,93%
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	477	462	96,86%
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	834	830	99,64%
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	782	782	100,00%
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	1	1	100,00%
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2	2	100,00%
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3	3	100,00%
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	43	10	23,26%
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1	1	100,00%

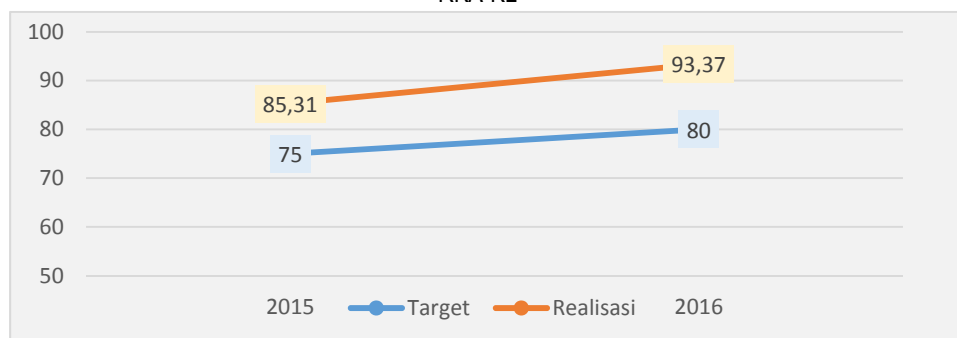
Daftar Partisipasi  
Penyampaian Capaian  
Kinerja RKA-K/L  
Kementerian Lembaga  
tahun 2015

Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Satker	Jumlah Partisipasi Satker Tahun 2016	Partisipasi Satker Tahun 2016
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	321	7	2,21%
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	135	15	11,11%
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	42	38	90,48%
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1	1	100,00%
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1	1	100,00%
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1	1	100,00%
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1	1	100,00%
054	BADAN PUSAT STATISTIK	513	509	99,22%
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	36	36	100,00%
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	558	354	63,55%
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	36	36	100,00%
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61	61	100,00%
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1254	1244	99,20%
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	41	40	97,56%
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1	1	100,00%
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	40	38	95,00%
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	175	175	100,00%
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	398	304	76,38%
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	42	42	100,00%
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1	1	100,00%
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	183	183	100,00%
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	549	526	95,81%
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1	1	100,00%
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1	1	100,00%
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	47	46	97,87%
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	20	20	100,00%
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	19	19	100,00%
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	21	21	100,00%
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1	1	100,00%
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	1	1	100,00%
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3	3	100,00%
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	8	8	100,00%
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	35	35	100,00%
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	15	15	100,00%
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	39	39	100,00%
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	299	299	100,00%
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	35	9	25,71%
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1	1	100,00%
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	2	2	100,00%
100	KOMISI YUDISIAL RI	1	1	100,00%

Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Satker	Jumlah Partisipasi Satker Tahun 2016	Partisipasi Satker Tahun 2016
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1	1	100,00%
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	29	29	100,00%
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	1	1	100,00%
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1	1	100,00%
107	BADAN SAR NASIONAL	36	35	97,22%
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1	1	100,00%
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	1	1	100,00%
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1	1	100,00%
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	26	26	100,00%
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1	1	100,00%
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1	1	100,00%
114	SEKRETARIAT KABINET	1	1	100,00%
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	35	35	100,00%
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	70	70	100,00%
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	30	30	100,00%
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	1	1	100,00%
119	BADAN KEAMANAN LAUT	1	1	100,00%
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1	1	100,00%
121	BADAN EKONOMI KREATIF	1	1	100,00%
Total				93,37%

**Grafik 3.4**

Perkembangan Persentase Satker yang Menyampaikan Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL



Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka monev satker terkait pengisian capaian kinerja melalui aplikasi SMART sebesar Rp791.759.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp.589.684.800,-(74,47%).

Pada tahun mendatang, DJA akan melakukan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan partisipasi satker dalam menyampaikan capaian kinerjanya. Penyampaian capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L penting mengingat

hasil monev digunakan sebagai dasar merumuskan rekomendasi atas kebijakan penganggaran supaya lebih optimal.

## 5. Harmonisasi Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas

Kebijakan penganggaran yang berkualitas adalah kebijakan yang berimplikasi pada penyusunan dan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga yang merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan agar keseluruhan program kerja pemerintah dapat berjalan optimal. Dalam rangka mewujudkan hal ini, disusunlah Sasaran Strategis yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Sasaran Strategis itu diterjemahkan dalam IKU Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Harmonisasi Kebijakan penganggaran yang berkualitas	Rp 689.539.000,-	Rp606.276.840,-	87,92%

**Tabel 3.11**  
Capaian Sasaran Strategis Kebijakan penganggaran yang berkualitas

Capaian Sasaran Strategis Kebijakan penganggaran yang berkualitas

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
5	<b>Harmonisasi Kebijakan penganggaran yang berkualitas</b>			120,00
5a - N	Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/ kebijakan bidang penganggaran	80,00%	<b>108.46%</b>	120
5b - N	Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75,00%	<b>75,00%</b>	100
5c - N	Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	100%	<b>100%</b>	100

**5a-N** Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran

IKU ini mengukur kualitas rekomendasi DJA kepada Menteri Keuangan dalam penyelesaian harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran yang diusulkan oleh K/L (pihak luar DJA). Untuk mengukur capaian IKU tersebut, ditetapkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi DJA yang disetujui Menteri Keuangan}}{\text{Jumlah rekomendasi DJA yang disampaikan kepada Menteri Keuangan}} \times 100\%$$

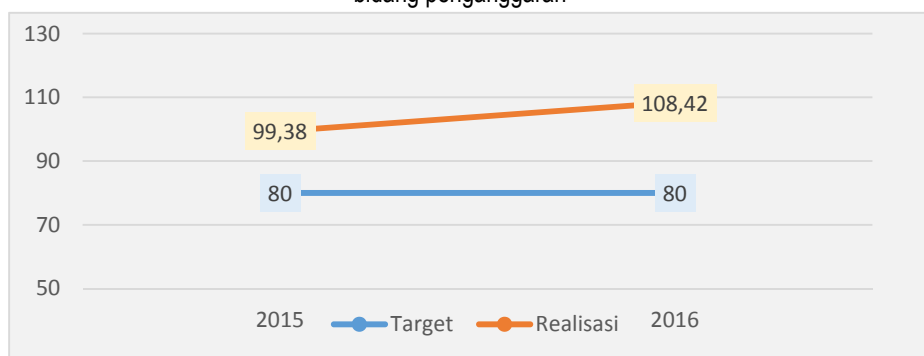
Selama periode tahun 2016 dari total 133 rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan di bidang penganggaran yang diajukan ke Menteri Keuangan :

1. Seluruhnya (133 usulan) disetujui oleh Menteri Keuangan, dan
2. Seluruhnya (133 usulan) lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sesuai SOP (22 hari).

Sehingga diperoleh realisasi rata-rata setahun sebesar 108,46% (indeks capaian 120). Guna mendukung tercapainya target tersebut, DJA telah melaksanakan kegiatan *workshop Regulatory Impact Analysis (RIA)* untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan.

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka penyusunan rekomendasi harmonisasi peraturan di bidang penganggaran (lingkup jaminan sosial, remunerasi, PNBP dan K/L) sebesar Rp27.900.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp 22.400.000,- (80,28%).

**Grafik 3.5**  
Perkembangan Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/ kebijakan bidang penganggaran



Pada tahun mendatang, DJA akan melakukan beberapa upaya perbaikan untuk mencapai IKU persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran dengan melengkapi analisis/ kajian dengan data referensi yang lebih mendalam serta merumuskan rekomendasi baru yang lebih komprehensif.

#### **5b-N** Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS

Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan perbaikan sistem jaminan pensiun dan THT PNS, DJA pada tahun 2016 menetapkan IKU "Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS". IKU ini mengukur penyelesaian kebijakan berdasarkan pada penyampaian rekomendasi perbaikan sistem jaminan pensiun dan THT PNS kepada Menteri Keuangan yang meliputi:

1. Besaran manfaat
2. Besaran iuran
3. Badan Penyelenggaraan
4. Skema Penyelenggaraan

Pada tahun 2016, DJA telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi identifikasi dan perumusan masalah, koordinasi internal dan eksternal, menyusun kajian, dan penyusunan rekomendasi alternatif kebijakan. Adapun capaian IKU ini pada tahun 2016 adalah 75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%, sehingga indeks capaian sebesar 100%

Adapun perbaikan sistem pensiun dan THT PNS yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. PMK Nomor 128/PMK.02/2016 tentang persyaratan Besaran dan Manfaat Tabungan Hari Tua bagi PNS.
2. PMK Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Persyaratan Besaran dan Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim
3. Draft PMK tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS dan Program JKK JKM ASN (Dalam proses pengundangan di Kemenkum dan HAM.
4. Draft PMK tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS, JKK dan JKM Prajurit TNI, anggota POLRI dan pegawai ASN di lingkungan Kemenhan dan POLRI (dalam proses pengundangan di Kemenkum dan HAM
5. Kajian Jaminan Pensiun

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka penyusunan rekomendasi perbaikan sistem jaminan pensiun dan THT PNS sebesar Rp264.655.600,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp.233.544.735,- (88,24%).

Pada masa mendatang, untuk meningkatkan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan perbaikan sistem jaminan pensiun dan THT PNS, DJA akan melakukan reviu atas peraturan dan kebijakan terkait sistem pensiun dan THT PNS.

Guna meningkatkan kualitas penyelesaian kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN, DJA pada tahun 2016 menetapkan IKU "Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN". Adapun Kebijakan Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diukur dalam IKU ini adalah PMK tentang Dana Operasional BPJS Tahun 2017. Untuk mengukur capaian IKU tersebut, ditetapkan formula sebagai berikut:

**(50% Kajian terkait SJSN + 50% Tingkat penyelesaian Kebijakan Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN )**

Pada tahun 2016, capaian IKU ini sebesar 100% dari target yang ditentukan sebesar 100% (indeks 100) dengan rincian sebagai berikut:

**5c-N Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN**

1. Telah disusun kajian dengan judul “Kajian Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan”, dan dilaporkan ke Direktur Jenderal Anggaran dengan nota dinas nomor ND-438/AG.8/2016 tanggal 6 Desember 2016.
2. Telah disusun penyelesaian kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan berupa draft PMK tentang dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 dan disampaikan ke Menteri Keuangan dengan nota dinas Nomor ND-567/AG/2016 tanggal 6 Desember 2016.

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN sebesar Rp396.983.400,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp350.332.105,- (88,25%).

Pada masa mendatang, untuk meningkatkan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan perbaikan kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN, DJA akan melakukan penyempurnaan atas kebijakan terkait.

## 6. Penyusunan Perencanaan anggaran yang akurat

Perencanaan anggaran merupakan perencanaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang akan menentukan penyediaan dana serta terselenggaranya program-program pemerintah sehingga mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional dan kesinambungan fiskal.

**Tabel 3.12**  
Capaian Sasaran Strategis Penyusunan Perencanaan Anggaran yang Akurat

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Indeks Capaian
6	<b>Penyusunan perencanaan anggaran yang akurat</b>			
6a - CP	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5%	2,62%	148%
6b - CP	Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	12,50%	8,83%	129,4%

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Penyusunan perencanaan anggaran yang akurat	Rp 809.592.000,-	Rp769.474.900,-	95,04%

Dalam rangka mencapai sasaran startegis yang telah ditetapkan tersebut, DJA menyusun IKU “Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat”. Adapun deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri atas dua komponen, yaitu:

- a. Deviasi Penerimaan Kas yaitu Proyeksi atas Penerimaan PNBK kecuali PNBK K/L karena sejalan dengan arahan Menteri Keuangan bahwa Penerimaan PNBK bukan domain dari DJA, DJA hanya menyelenggarakan sistem pengelolaannya saja.
- b. Deviasi Pengeluaran Kas hanya untuk proyeksi BA BUN yang PPA-nya adalah DJA adalah BA 999.07 dan 08.

Unit eselon I wajib menyampaikan data proyeksi satu tahun yang dirinci bulanan kepada Tim CPIN paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal tahun berjalan melalui surat. Apabila unit tidak menyampaikan proyeksi bulanan, maka data proyeksi yang diambil adalah proyeksi yang disampaikan pada awal tahun sebagai dasar perhitungan capaian IKU pada bulan berjalan. Dalam satu bulan tim CPIN dapat melakukan rapat sebanyak 2 kali.

Jika ada perbaikan kembali, unit eselon I dapat memberikan data proyeksi kepada Tim CPIN melalui surat paling lambat 2 hari sebelum rapat CPIN kedua (minggu ketiga bulan berjalan) yang dijadikan sebagai acuan perhitungan proyeksi untuk perhitungan capaian IKU tersebut. Adapun formula untuk mengitung capaian IKU tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Deviasi Penerimaan Kas		
Deviasi proyeksi penerimaan kas bulan (m) =	proyeksi penerimaan kas - realisasi penerimaan kas	x 100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi penerimaan Kas =	Deviasi bulan (m) + Deviasi Bulan (m+1) + Deviasi bulan (m+2)	x 100%
	3	
Deviasi Pengeluaran Kas		
Deviasi proyeksi pengeluaran kas bulan (m) =	proyeksi pengeluaran kas - realisasi pengeluaran kas	x 100%
	Proyeksi pengeluaran kas	
Deviasi pengeluaran Kas =	Deviasi bulan (m) + Deviasi Bulan (m+1) + Deviasi bulan (m+2)	x 100%
	3	
Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas		
Deviasi proyeksi perencanaan kas =	Deviasi proyeksi penerimaan kas + Deviasi Proyeksi pengeluaran kas	100%
	2	

Pada tahun 2016, guna mendukung tercapainya IKU ini, DJA telah melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring penerimaan dan subsidi secara berkala. Pada tahun 2016, deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat diketahui sebesar 2,62%. Target deviasi ini lebih rendah dari yang telah ditetapkan sebesar 5%, sehingga indeks capaian atas IKU ini sebesar 148%

Tabel 3.13  
Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas per Desember 2016:

Uraian	Oktober			November			Desember			Dev Q4 (%)	Dev S.d Des (%)
	Proyeksi (*)	Realisasi (*)	Dev (%)	Proyeksi (*)	Realisasi (*)	Dev (%)	Proyeksi (*)	Realisasi (*)	Dev (%)		
Minyak Bumi	5.388,02	5.070,01	-5,90	6.604,86	6.604,86	0,00	8.682,00	10.099,63	16,33		
Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.508,95	40,36		
Panas Bumi	0,52	0,93	78,85	261,40	257,90	-1,34	168,64	168,92	0,17		
Laba BUMN	1.700,57	1.707,26	0,39	6,70	20,20	201,49	1.500,00	1.585,50	5,70		
	<b>7.089,11</b>	<b>6.778,20</b>	<b>-4,39</b>	<b>6.872,96</b>	<b>6.882,96</b>	<b>0,15</b>	<b>12.850,65</b>	<b>15.363,01</b>	<b>19,55</b>	<b>5,10</b>	<b>0,06</b>
Subsidi BBM	6.016,14	6.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,33	7.769,40	0,00		
Subsidi Listrik	5.469,90	5.469,90	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.840,72	2.840,90	0,01		
	<b>11.486,04</b>	<b>11.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,05</b>	<b>10.610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Deviasi Bulanan :			-2,19			0,07			9,78		
Deviasi Triwulanan										4,01	2,62

Keterangan:

- (\*) Proyeksi dan realisasi dalam Milyar Rupiah
- Pembayaran Subsidi Listrik sebesar Rp10,9 T tidak dimasukkan dalam perhitungan. Arahan dan DIPA untuk subsidi tersebut baru dikeluarkan tanggal 30 Desember 2016
- Realisasi Laba BUMN dari PT. KS sebesar Rp0,9 T tidak dimasukkan dalam perhitungan. (Transaksi Non Kas)

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangkapyusunan proyeksi perencanaan kas khusus PNBPN dan subsidi energi sebesar Rp487.742.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp451.017.400,- (92.47%).

Pada masa mendatang, untuk menjaga agar proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat tetap berada pada batas deviasi yang ditetapkan, DJA akan melakukan rapat koordinasi dan monitoring penerimaan dan subsidi secara berkala.

6b-N

Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L

IKU ini mengukur deviasi antara rencana penyerapan dana yang akan dibelanjakan seluruh K/L sebagaimana yang tertuang pada halaman III DIPA (berdasarkan pagu APBN-P) pada setiap bulan dengan realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L (sesuai SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN). Mengingat IKU ini mengukur perencanaan anggaran dan realisasi penyerapan dana, maka DJA ditunjuk menjadi *Unit in Charge (UIC)* atas tercapainya target yang dicanangkan untuk IKU tersebut. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{[\text{Rencana Penarikan Dana} - \text{Realisasi Penyerapan Anggaran}]}{\text{Rencana Penarikan Dana}} \times 100\%$$

Angka rencana penyerapan anggaran merupakan jumlah rencana yang akan dibelanjakan oleh K/L setiap bulan yang tertuang dalam data aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Di sisi lain, penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L adalah jumlah realisasi penyerapan belanja negara dalam satu periode. Adapun data realisasi anggaran bersumber dari dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (sumber data: Data Business Intelligence DJA)

Pada tahun 2016 ditetapkan target deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L sebesar 12,50%. Selanjutnya, berdasarkan realisasi pengeluaran SP2D hingga 31 Desember 2016 yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan diperoleh capaian deviasi selama tahun 2016 sebesar **8,83%** sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Adapun rincian detail target dan realisasi per triwulan sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
Perbandingan Target dan Capaian IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L

Capaian IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L

Target/ Realisasi	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2016
a. Target	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
b. Realisasi	1,96%	15,87%	6,61%	10,88%	<b>8,83%</b>
<b>Indeks</b>	<b>184,32</b>	<b>73,04</b>	<b>147,1</b>	<b>112,9</b>	<b>129,40</b>

DJA telah berupaya untuk mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L salah satunya dengan melakukan monitoring bulanan atas realisasi penyerapan/ output.

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka money tingkat pusat K/L sebesar Rp321.850.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp318.457.500,- (98,84%).

Pada masa mendatang, DJA telah mempersiapkan rencana aksi salah satunya menyampaikan materi dan sosialisasi terkait PMK Nomor 277/PMK.05/2015 untuk mendorong K/L atau Satker untuk menyusun RPD yang akurat berdasarkan rencana kegiatan.

Proses penganggaran dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sehingga pengelolaan penganggaran menjadi efisien, transparan, fleksibel, dan akuntabel.

**7. Kebijakan sistem penganggaran yang optimal**

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran yang disusun dengan orientasi output. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Sasaran Strategis ini disusun IKU Persentase Penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L, IKU Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Kebijakan sistem penganggaran yang optimal	Rp 1.015.455.000,-	Rp 614.948.680,-	60,56%

**Tabel 3.15**

Capaian Sasaran Strategis Kebijakan sistem penganggaran yang optimal

Capaian Strategis Kebijakan sistem penganggaran yang optimal

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
7	<b>Kebijakan sistem penganggaran yang optimal</b>			104,79
7a - N	Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100,00%	<b>100,00%</b>	100,00
7b - N	Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100,00%	<b>113,47%</b>	113,47
7c - N	Penyelesaian Implementasi RKA-K/L online	70,00%	<b>72,41%</b>	103,44%

**7a-N**

**Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L**

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L merupakan tahapan penting yang perlu diwujudkan sebagai dasar untuk mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja. IKU ini mengukur persentase penanggung jawab program yang menerapkan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (saat ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Lampiran V). IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan K/L dalam menerapkan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA K/L. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut:

**Formula**

IKU Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L

$$\frac{\sum \text{Penanggung jawab program yang menerapkan ADIK dalam RKA-K/L}}{\sum \text{Penanggung jawab program}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, capaian atas IKU Persentase Penerapan Arsitektur Dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L sebesar **100%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% (indeks capaian 100). Adapun rincian atas capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L

**Tabel 3.16**

Capaian IKU Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L

$\sum$ Penanggung jawab program yang menerapkan ADIK dalam RKA-K/L	87
$\sum$ Penanggung jawab program	87
Persentase (%)	<b>100</b>

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka mengevaluasi implementasi ADIK sebesar Rp21.810.000,- . Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp21.840.000,- (99,86%)

Pada tahun 2016, dalam rangka mencapai target penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L, DJA telah melaksanakan sosialisasi, *workshop*, dan pendampingan kepada K/L terkait konsep ADIK pada RKA-K/L. Selain itu DJA juga telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktorat Anggaran bidang Ekontim, Direktorat Anggaran bidang PMK, serta K/L yang belum menyampaikan hasil penataan ADIK dan RKA-K/L TA 2017.

Pada tahun mendatang, untuk meningkatkan kualitas penerapan ADIK pada RKA-K/L, DJA akan menawarkan kepada pejabat/pegawai di lingkungan serta sosialisasi kepada para K/L atas ADIK.

7b-N

**Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu**

Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2016 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016. Revisi DIPA dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK No. 62/PMK.02 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-P pada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014,

jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan). Adapun formula untuk menghitung capaian ini adalah sebagai berikut:

**Formula**

IKU Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

$$\left( \left( \frac{\Sigma \text{ dokumen yang tepat waktu}}{\Sigma \text{ dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left( \left( \frac{\text{Indeks waktu standar}}{\text{Rata-rata waktu penyelesaian}} \right) \times 30\% \right)$$

Indeks waktu standar sesuai SOP adalah 5 hari kerja dan 1 hari kerja. Perhitungan revisi anggaran dimulai pada saat dokumen telah diterima secara lengkap, mengacu pada PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun 2016, capaian atas IKU ini sebesar **113,47%**. Nilai capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% (indeks capaian 111,37). Dari jumlah total revisi pada tahun 2016, berjumlah 1381 usulan revisi, dengan jumlah revisi dengan waktu kurang atau sama dengan 5 hari berjumlah 1301 revisi. Adapun rincian atas capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
Jangka waktu penyelesaian revisi anggaran tahun 2016

Jangka waktu penyelesaian revisi anggaran tahun 2016

Unit Eselon II	Jumlah Revisi	Revisi < 5 hari kerja					Revisi Tepat Waktu (5 hari kerja)	Revisi > 5 hari kerja			
		1 hari	2 hari	3 hari	4 hari	Total		6 hari	7 hari	> 7 hari	Total
Dit. Abid. Ekontim	137	29	73	28	4	134	3	0	0	0	0
Dit. Abid. PMK	118	13	29	33	27	102	14	1	1	0	2
Dit. Abid. Polhukhankam & BA BUN	95	41	18	15	12	86	6	1	0	2	3
<b>Total</b>	<b>350</b>	<b>83</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>322</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

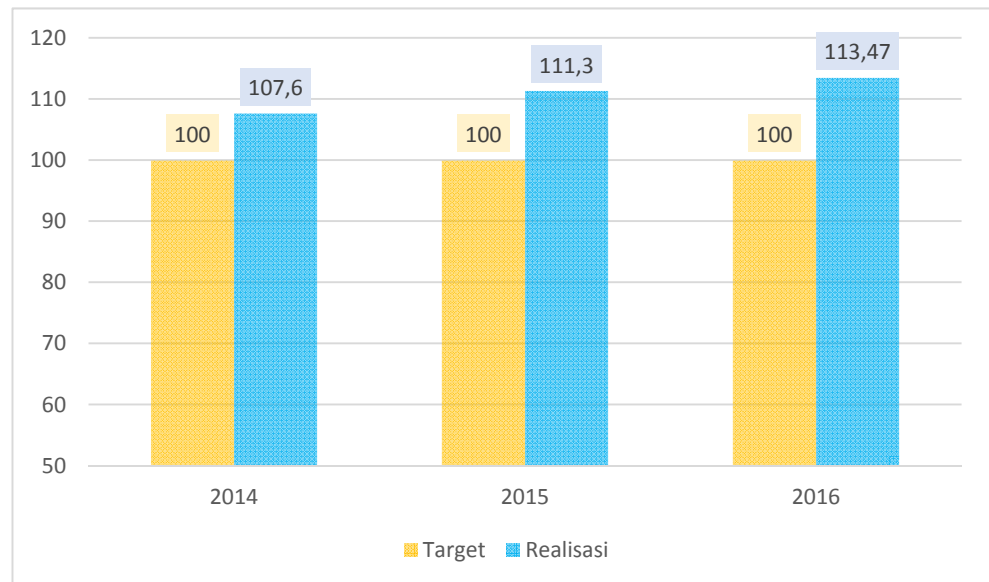
Selama setahun DJA telah memproses 1381 usulan revisi dengan penyelesaian:

- Kurang dari 5 hari kerja sebanyak 1301 revisi
- 5 hari kerja sebanyak 60 revisi
- Lebih dari 5 hari kerja sebanyak 19 revisi

Pada tahun 2016, untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian revisi anggaran, DJA telah melakukan rapat koordinasi internal DJA (antar-Eselon II) untuk menanggapi guna merumuskan solusi penyelesaian yang tepat. Serta melakukan *overview* keseluruhan proses revisi di DJA.

Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

**Grafik 3.6**  
Perkembangan Persentase Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu



Pada tahun mendatang, untuk menyempurnakan proses pelayanan revisi anggaran, DJA akan melakukan perbaikan peraturan substansi & sistem terkait revisi anggaran serta peningkatan kapabilitas SDM DJA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan DJA khususnya penyelesaian revisi anggaran tepat waktu telah dibuat beberapa perbaikan proses bisnis dan aplikasi pada tahun 2016. Kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp626.195.000 rang realisasinya terserap sebesar Rp248.698.000,- (39,71%)

7c-N

**Persentase Implementasi penelaahan RKA-K/L Online**

Untuk mengukur jumlah K/L yang telah melakukan penelaahan online sesuai dengan penyesuaian proses bisnis pengelolaan RKA-K/L, pada tahun 2016 DJA menetapkan IKU " Persentase Implementasi penelaahan RKA-K/L Online".

Penelaahan RKA-K/L merupakan kegiatan meneliti :

- kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran;
- kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya;
- relevansi komponen/tahapan dengan keluaran; dan
- konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiran maju 3 (tiga) tahun kedepan

Adapun kegiatan penelaahan RKA-K/L Online merupakan penelaahan yang dilakukan tanpa tatap muka dan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA Online pada penelaahan Pagu Anggaran dan Penelaahan Alokasi Anggaran. Untuk menghitung capaian atas IKU ini ditetapkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Jumlah K/L yang telah melakukan penelaahan RKA-K/L online anggaran}}{\Sigma \text{ Jumlah K/L}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, IKU ini memperoleh realisasi 72,41% dari target 70% (capaian 103,44). Adapun rincian atas capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Indeks Capaian
70% (61 K/L)	<b>72,41%</b> (63 K/L)	103,44

Keterangan: Jumlah K/L yang aktif melakukan pelatihan menggunakan aplikasi RKA-K/L online pada TA 2016 sebanyak 87 KL.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi penelaahan RKA-KL online telah dilakukan alokasi pada DIPA tahun 2016 sebesar Rp 367.450.000,-. Adapun realisasinya terserap Rp. 344.410.680,- (93,72%)

## 8. Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kinerja yang berkelanjutan, DJA melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monev dimaksud dilakukan dengan melakukan pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dan menganalisa efektivitas program K/L maupun internal DJA untuk mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.18**  
Capaian Sasaran Strategis Monitoring dan evaluasi yang efektif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
<b>8</b>	<b>Monitoring dan evaluasi yang efektif</b>			107,94%
8a - CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52%	<b>56,13%</b>	107,94%
8b - N	Persentase penerapan Sistem <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> berbasis kinerja.	N/A	<b>N/A</b>	N/A

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Monitoring dan evaluasi yang efektif	Rp 32.800.000,-	Rp 32.150.000,-	98.01%

Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.
- rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Adapun untuk menghitung capaian IKU ini ditetapkan formula sebagai berikut:

$$= \left( \frac{a}{b} \times 50\% \right) + \left( \frac{c}{d + (b - a)} \times 50\% \right)$$

Keterangan:

a = Jumlah rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai

b = Jumlah outstanding rekomendasi BPK 2 tahun sebelumnya

c = Jumlah rekomendasi BPK yang diusulkan selesai

d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK 1 tahun sebelumnya

Pada semester 1 hanya menggunakan formula rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai dengan bobot menjadi 100%.

Dalam hal BUN, cakupan yang tugas DJA adalah:

1. Penyelesaian atas rekomendasi BA BUN 999.07 dan 999.08 dimana DJA sebagai PPAnya.
2. Atas BA BUN selain 999.07 dan 999.08, DJA bertanggung jawab atas penyusunan ketentuan BA.BUN secara umum serta monitoring dan pengkomunikasian penyelesaian Rekomendasi, sedangkan penyelesaian rekomendasi adalah tanggung jawab PPA masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan IKU tersebut, DJA melakukan monitoring penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti bersama dengan unit terkait yang dilakukan secara berkala (bulanan). Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan atas penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti DJA diperoleh perhitungan dari target 52% diperoleh capaian sebesar **56,13%** (Indeks 107,94).

**Tabel 19**  
Perhitungan Detil Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2016

Unit in Charge	LKPP/ LKBUN	Semester I			Semester II		
		Jumlah rekomendasi	Selesai (Berdasarkan LHP LKPP 2015)	Persentase	Jumlah rekomendasi	Diusulkan selesai	Persentase
DJA	LKPP	62	24	38,71%	76	63	60,8%
	LKBUN	51	14	27,45%	53	40	51,48%
	Rata-rata			33,08%			56,13%

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran Rp32.800.000,- Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp32.150.000,- (98,01%)

Pada tahun mendatang, untuk menyempurnakan proses pelayanan revisi anggaran, DJA akan melakukan perbaikan peraturan substansi & sistem terkait revisi anggaran serta peningkatan kapabilitas SDM DJA.

Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 pasal 17, kebijakan penerapan sistem *reward and punishment* berubah menjadi insentif atas kinerja anggaran K/L. Dengan demikian, revisi atas Perpres 39 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan sebab sistem *reward and punishment* tidak lagi diterapkan. Oleh karena itu, IKU ini tidak diperhitungkan sebagai NKO 2016.

8b-N

Persentase penerapan Sistem *Reward and Punishment* berbasis kinerja.

## 9. SDM yang kompetitif

Dalam rangka memenuhi ketersediaan pejabat yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sesuai jabatannya, maka DJA menetapkan sasaran strategis “SDM yang kompetitif”. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kompetensi dan kinerja yang terbaik yang menjadi penentu keberhasilan organisasi. Hal ini sejalan dengan sistem merit yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh KL di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam sistem merit, 2 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan SDM adalah kompetensi dan kinerja. Oleh karena itu, untuk DJA menetapkan Sasaran Strategis SDM yang Kompetitif sebagai upaya untuk mencapai kondisi SDM yang memiliki keunggulan kompetitif.

Sasaran strategis ini terdiri atas IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Tujuan ditetapkannya IKU ini adalah tersedianya pejabat yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sesuai jabatannya. Adapun capaian atas Sasaran Strategis ini Pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompetitif

Capaian Strategis SDM yang kompetitif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
9	<b>SDM yang kompetitif</b>			111,26
9a - N	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89,00%	<b>99,02%</b>	111,26

**9a - N** Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, diperoleh dari jumlah pejabat eselon II, III dan IV DJA yang memiliki nilai JPM  $\geq 72$  dibandingkan dengan jumlah pejabat eselon II, III dan IV DJA yang telah mengikuti *Assessment Center*.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Monitoring dan evaluasi yang efektif	Rp 32.800.000,-	Rp 32.150.000,-	98.01%

**Formula**  
IKU Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

Adapun untuk menghitung capaian IKU ini ditetapkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJA yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJA}} \times 100\%$$

yang telah mengikuti *assessment*

Pada tahun 2016, DJA telah melaksanakan program *re-assessment* terhadap sebagian pejabat terutama untuk pejabat kandidat promosi. Selain itu, telah dilakukan pula penugasan ke beberapa pejabat untuk mengikuti diklat/training berbasis kompetensi. Dari total pejabat DJA sebanyak 204 orang yang telah memenuhi  $JPM \geq 72\%$ , sebanyak 202 orang atau 99,02% (indeks 111,26) telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan rincian sebagai berikut:

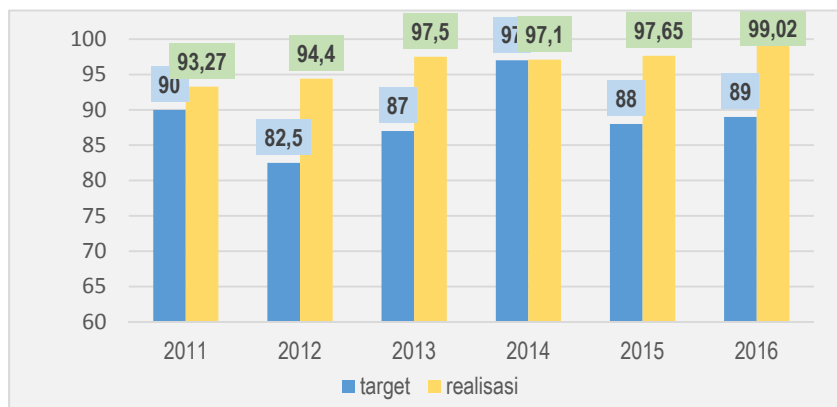
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

**Tabel 3.21**  
Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

No.	Eselon	Jumlah Pejabat	Jumlah Pejabat yang Memenuhi SKJ	%
1	Eselon II	8	8	100,00
2	Eselon III	41	41	100,00
3	Eselon IV	155	153	98,71
	Total	204	202	<b>99,02</b>

Perkembangan Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

**Grafik 3.7**  
Perkembangan Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan



Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat DJA sebesar Rp406.384.000,- Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp398.517.500,-(98,06%).

Pada tahun mendatang, untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian atas IKU ini DJA akan mengupayakan langkah sebagai berikut:

1. Proses *coaching* dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
2. Melakukan program *re-assessment* bagi pejabat yang belum melakukan *assessment* kembali dalam kurun waktu 2 tahun.

## 10. Organisasi yang kondusif

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja, program pengembangan SDM dan kualitas kerja, alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja, mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Indeks Kesehatan Organisasi Persentase Implementasi Inisiatif dan IKU Transformasi Kelembagaan. Adapun capaian atas Sasaran Strategis ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
Capaian Sasaran Strategis Organisasi yang Kondusif

Capaian Strategis  
Organisasi yang  
kondusif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
10	<b>Organisasi yang Kondusif</b>			114,94
10b - N	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87,00%	100%	114,94

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Organisasi yang Kondusif	Rp 1.789.071.000,-	Rp 1.320.476.000,-	73.80%

10b - N

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja secara signifikan, pelayanan kepada stakeholder, dan sebagai upaya perwujudan *good governance* serta kelanjutan program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan mencanangkan program transformasi kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran strategis. Kementerian Keuangan harus bertransformasi untuk meninggalkan sekat-sekat sektoral dan harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul. Perbaikan internal organisasi Direktorat Jenderal Anggaran menghasilkan *blueprint* Transformasi Kelembagaan yang didalamnya berisi 6 inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan seterusnya.

Berdasarkan KMK 36 Tahun 2013, program Transformasi Kelembagaan memuat 6 inisiatif Transformasi yang penyelesaiannya dibedakan atas 3 kurun waktu:

1. Membangun momentum untuk reformasi (2013-2014)
2. Membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar (2015-2019)
3. Melembagakan terobosan dalam jangka panjang (2019-2025)

Monitoring dan evaluasi kesuksesan implementasi inisiatif program Transformasi Kelembagaan, dilaporkan secara semesteran kepada Menteri Keuangan, namun progres penyelesaiannya dilaporkan tahunan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan diukur menggunakan persentase capaian atas inisiatif.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2016, implementasi Bidang I sampai dengan bidang VI sebagaimana tercantum dalam aplikasi Mitra dilaporkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
Target implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan DJA tahun 2016

Inisiatif	Uraian	Kumulatif Capaian	2016
Inisiatif I	Beralih kepada Arsitektur Anggaran yang terfokus pada outcome	60%	100%
Inisiatif II	Memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi pada outcome anggaran	80%	100%
Inisiatif III	Merampingkan proses anggaran <i>end-to-end</i>	66%	100%
Inisiatif IV	Memperkuat efektivitas interaksi dengan para stakeholder eksternal	75%	100%
Inisiatif V	Membangun kapabilitas K/L	50%	100%
Inisiatif VI	Membangun kapabilitas internal	88%	100%

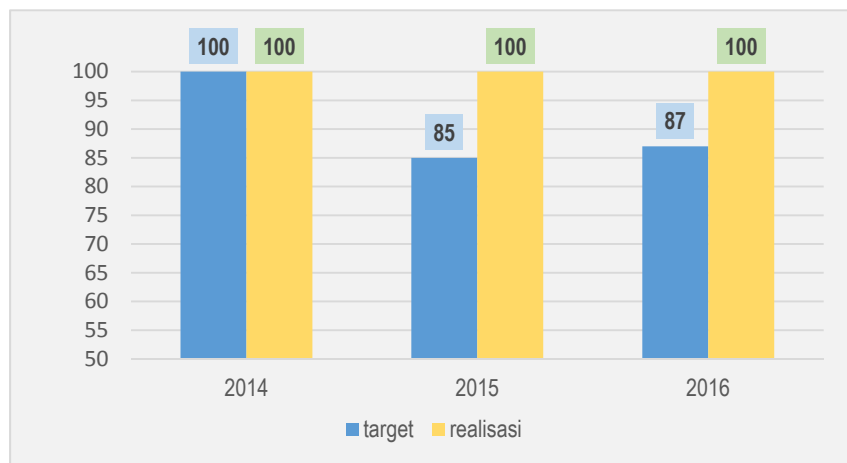
Pada tahun 2016, persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan memperoleh capaian sebesar **100%**, melebihi target yang ditetapkan yaitu 87% (indeks capaian 114,94). Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2016 DJA telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Bidang	Uraian Kegiatan
I	Penataan informasi kinerja telah sampai pada tahun ke-2 dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Hal pokok yang dilakukan pada tahun 2016 adalah melakukan integrasi hasil penataan ADIK dalam dokumen penganggaran. Sejalan dengan hal tersebut pelatihan perbaikan pedoman telah dilakukan.
II	Sinergi dua unit eselon I telah dilakukan dengan memunculkan single sign-on aplikasi OM-SPAN dan aplikasi SMART sebagai bentuk integrasi sebagaimana dimandatkan dalam memo No.02/MK.1/2016.

III	Telah dilaksanakan upaya peningkatan kualitas perhitungan KPJM penyederhanaan penelaahan RKA-KL, penyederhanaan dan pembatasan revisi anggaran, serta penyelesaian kajian untuk pengurangan satker.
IV	Telah dilaksanakan penetapan pedoman trilateral meeting perdirjen 7/AG/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan RKA-KL bagi pegawai Ditjen Anggaran sebagai pedoman interaksi dengan pihak eksternal.
V	Telah dilaksanakan perancangan informasi anggaran yang lebih user friendly serta kajian desain budget learning center serta fungsionalisasi taskforce
VI	Telah dilaksanakan peraturan pokok yang menjadi landasan jabatan fungsional analis anggaran

Adapun perkembangan capaian atas IKU ini adalah sebagai berikut.

**Grafik 3.8**  
Perkembangan Capaian Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJA



Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan dan monitoring Transformasi Kelembagaan sebesar 1.789.071.000,-. Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp1.320.476.000(73,80%).

## 11. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Sistem informasi dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju subsistem yang diperlukan serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien.

Sasaran strategis ini terdiri atas IKU Implementasi Penelaahan RKA-K/L *Online* dan IKU Implementasi Penggunaan Aplikasi SIMPONI. Adapun capaian atas Sasaran Strategis ini Pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
Capaian Sasaran Strategis Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
11	<b>Sistem informasi manajemen yang terintegrasi</b>			
11a - CP	Tingkat down time sistem TIK	1%	0,06%	120,00%
11b - N	Implementasi <i>e-government services</i>	100%	100%	100,00%

Capaian Strategis Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	Rp 291.342.000,-	Rp 238.498.720,-	81,86%

### 11a – CP Tingkat *down time* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun *core system* layanan TIK meliputi: Layanan Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I (Custom Web, Simponi,dll.)

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kemenkeu; dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *downtime* yang direncanakan (*planned downtime*) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive Maintenance). Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan *downtime* layanan TIK disusun berdasarkan hasil pemantauan

ketersediaan layanan dengan menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati. berikut:

**Formula**  
IKU Tingkat down time sistem TIK

$$\frac{\text{Rata-rata jam } \textit{downtime} \text{ setiap layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi}}{\text{Jumlah jam layanan TIK dalam satu periode}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, capaian atas IKU ini sebesar **0,06%**. Capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 1% (indeks capaian 120. Untuk mendukung ketercapaian IKU ini, DJA telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. *Tunning* database dan aplikasi
2. Pengajuan pengadaan Network Area Storage (NAS) ke Bagian Umum (ND-141/AG.74/2016 tanggal 16 Maret 2016)
3. Mengusulkan pengadaan harddisk server baru atau pemindahan server baru
4. Melakukan monitoring perangkat IT DJA di DC Pusintek
5. Melakukan uji coba layanan TIK CW dan SIMPONI melalui DRC Kemenkeu di Kalimantan.
6. Monitoring *resource* infrastruktur SPAN
7. Optimalisasi *space server* SPAN oleh PT SIGMA (Pihak ke 3 yang dikontrak SPAN)

Salah satu isu utama dalam Layanan TIK DJA yang disertakan pada *down time* sistem TIK adalah layanan TIK *Custom Web* dan layanan TIK SIMPONI. Pada tahun 2016, kedua layanan tersebut memiliki jumlah data dan pengguna yang semakin besar serta *source* dan *backup* berada di satu server. Akibatnya *storage server* hampir penuh yang menyebabkan performance database SIMPONI kadang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan adanya kemungkinan layanan tidak dapat di akses atau akses menjadi lambat.

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.350.000,-. Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp 46.966.000,- (99,25%).

Pada tahun mendatang, DJA akan melakukan *tunning* database dan aplikasi secara periodik untuk meminimalisir tingkat *downtime* sistem TIK.

Untuk mempermudah proses birokrasi di lingkungan Internal, DJA membangun sistem layanan berbasis *E-Goverment Services*. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi pegawainya, proses bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

11b – CP Implementasi E-Government Services

1. Sudah memiliki rencana pengembangan *e-government* di lingkungan instansi
2. Sudah dilakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem *database* SDM, dll)
3. Sudah dilakukan pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)
4. Sudah dilakukan pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

Pada tahun 2016, tahap awal implementasi *e-government* yang dilakukan adalah melalui pengintegrasian aplikasi dan fitur dalam DJA Single Window (DSW) yang terdiri atas:

- a) Monitoring surat
- b) Monitoring disposisi surat
- c) Monitoring capaian bidang TK
- d) Pengumuman / *News*
- e) *Knowledge management*
- f) Monitoring ruang rapat
- g) Forum diskusi pegawai

Untuk mencapai target tersebut di atas, DJA telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka membangun dan mengembangkan aplikasi dan fitur dalam DSW, sehingga pada tahun 2016 capaian atas IKU ini adalah 100% dari target 100% (indeks capaian 100)

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 243.992.000,-. Realisasi penyerapan dana atas pencapaian IKU ini sebesar Rp 191.532.720,- (78,49%).

## 12. Pengelolaan anggaran yang optimal

Untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian output, DJA menetapkan Sasaran Strategis “Pengelolaan anggaran yang optimal”. Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Persentase Anggaran dan Pencapaian Output Belanja.

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas tiga komponen, sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

### a. Penyerapan Anggaran

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU).

### b. Efisiensi

Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan/belanja lainnya.

### c. Pencapaian Output

Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada SE-7/MK.1/2014 tentang tata cara pengukuran IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kemenkeu. Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi monev kinerja penganggaran.

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran strategis ini pada DIPA DJA tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Pagu 2016	Realisasi 2016	%
Pengelolaan anggaran yang optimal	Rp 275.480.000,-	Rp 270.505.000,-	98.19%

Adapun capaian atas Sasaran Strategis ini Pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai
12	<b>Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>			103,18
12a - CP	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,00%	<b>98,02%</b>	103,18

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

Adapun formula untuk menghitung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (\% \text{ penyerapan anggaran} \times 11,86\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 34,96\%) + (\% \text{ Realisasi Output} \times 53,18\%)$$

Keterangan:

Dalam hal Satker tidak memiliki pagu kontrak, bobot IKU adalah:

Penyerapan anggaran: 29,34%

Pencapaian keluaran: 70,66%

Pada tahun 2016, capaian atas IKU ini sebesar **98,02**. Capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,00% (indeks capaian 103,18).

Ketercapaian IKU ini tidak terlepas dari upaya DJA melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring Rencana Umum Pengadaan secara berkala.
- Rapat mingguan untuk monitoring pekerjaan penataan ruang kerja DJA.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun rincian atas capaian tersebut digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.26**  
Capaian Output DJA 2016

No.	Kegiatan/ Output pada DIPA DJA TA 201	Target	Realisasi
1	<b>Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)</b>	<b>98,3%</b>	<b>100%</b>
	a. Peraturan Pelaksanaan di Bidang Penganggaran		100%
	b. Laporan/ Monev Kegiatan		100%
2	<b>Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)</b>	<b>98,7%</b>	<b>100%</b>
	a. Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)		100%
3	<b>Penyusunan Rancangan APBN</b>	<b>96,6%</b>	<b>100%</b>
	a. Nota Keuangan Beserta RUU APBN dan RUU APBN-P		100%
	b. Laporan Analisis, Kegiatan, dan Proyeksi Kebijakan APBN		100%

4	<b>Pengelolaan PNBP dan Subsidi</b>	<b>97,7%</b>	<b>100%</b>
	a. Peraturan di Bidang PNBP dan Subsidi Energi		100%
	b. Laporan Monev/ Kegiatan		100%
5	<b>Pengembangan Sistem Penganggaran</b>	<b>94,7%</b>	<b>100%</b>
	a. Peraturan Bidang Penganggaran		100%
	b. Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran		100%
	c. Laporan Kajian/ Monev/ Kegiatan		100%
6	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran</b>	<b>95,7%</b>	<b>99,19%</b>
	a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan		100%
	b. Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan		100%
	c. Dokumen Kepegawaian		100%
	d. Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai		100%
	e. Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum		100%
	f. Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Lainnya DJA		100%
	g. Layanan Perkantoran		100%
	h. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		100%
	i. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		98,00%
	j. Gedung/ Bangunan		93,44%
	k. Dokumen DIPA		100%
7	<b>Harmonisasi Peraturan Penganggaran</b>	93,0%	98%
	<b>Total</b>	<b>94,32%</b>	<b>99,63%</b>

**Tabel 3. 27**  
Capaian Penyerapan Anggaran DJA 2016 Per Program

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi 2016	%
	<b>DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN</b>	<b>78.731.101.000</b>	<b>74.261.289.490</b>	<b>94,32%</b>
1	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	13.824.550.000	13.586.479.403	98,3%
2	Penyusunan dan Penyampaian LK BSBL	416.605.000	411.192.700	98,7%
3	Penyusunan Rancangan APBN	5.028.859.000	4.855.546.473	96,6%
4	Pengelolaan PNBP dan Subsidi	3.733.189.000	3.647.134.735	97,7%
5	Pengembangan Sistem Penganggaran	5.771.094.000	5.464.455.000	94,7%
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	107.903.294.000	103.259.949.332	95,7%
7	Harmonisasi Peraturan Penganggaran	2.914.738.000	2.710.127.729	93,0%

**Tabel 3.28**  
Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

Komponen	Capaian(%)	Bobot(%)	(%)
Penyerapan anggaran	94,32%	29,34%	27,67
Pencapaian output	99,63%	70,66%	70,39
<b>Realisasi IKU</b>			<b>98,20</b>

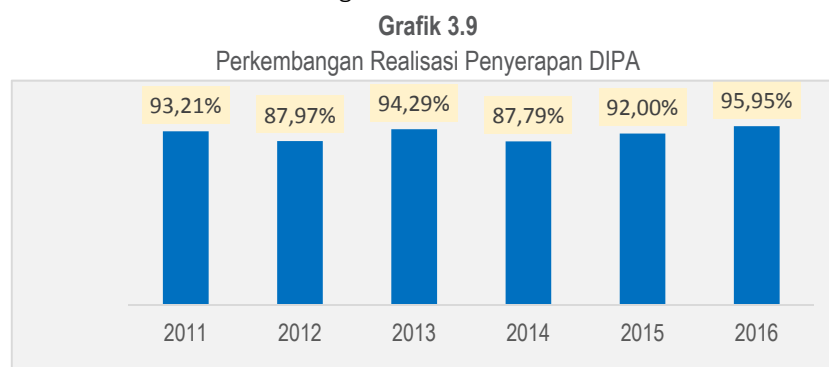
Adapun dana yang tidak terserap disebabkan antara lain:

- Adanya biaya pemeliharaan kendaraan yang tidak bisa dipakai karena terdapat proses penghapusan kendaraan pada tahun 2016
- Adanya penghematan biaya pengiriman dokumen DIPA karena terdapat beberapa Kanwil DJPB yang meminta pengiriman melalui Kanwil dan tidak langsung ke KPPN.
- Adanya perubahan jumlah peserta kegiatan perjalanan dinas khusus.

Pada tahun mendatang, untuk mempertahankan/meningkatkan persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, DJA akan mengupayakan monitoring bulanan dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Pengelola Kegiatan (SPK).

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data per 31 Desember 2016, realisasi penyerapan DIPA DJA TA 2016 secara keseluruhan jenis belanja adalah sebesar Rp 133.934.885.372,- atau mencapai **95,95%** dari total pagu setelah *self blocking* sebesar . Realisasi penyerapan DIPA tahun 2016 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 91,78%. Secara umum, perkembangan realisasi penyerapan DIPA dalam periode 2012-2016 terlihat dalam grafik berikut:



**Tabel 3.30**  
Rincian Realisasi Per jenis Belanja DJA tahun 2016

No	Belanja	Pagu DIPA	Realisasi (SP2D)	% Realisasi
1	Pegawai	Rp 60.861.228.000	Rp 60.153.048.163	98.84
2	Barang	Rp 64.354.632.000	Rp 60.745.859.755	94.39
3	Modal	Rp 14.376.469.000	Rp 13.035.977.454	90.68
	Jumlah	Rp 139.592.329.000	Rp 133.934.885.372	<b>95.95</b>

**Tabel 3.31**  
Realisasi Anggaran 2016 Per Program

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi 2016	%
	<b>DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN</b>	<b>78.731.101.000</b>	<b>74.261.289.490</b>	<b>94,32%</b>
1	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	13.824.550.000	13.586.479.403	98,3%
2	Penyusunan dan Penyampaian LK BSBL	416.605.000	411.192.700	98,7%
3	Penyusunan Rancangan APBN	5.028.859.000	4.855.546.473	96,6%
4	Pengelolaan PNPB dan Subsidi	3.733.189.000	3.647.134.735	97,7%
5	Pengembangan Sistem Penganggaran	5.771.094.000	5.464.455.000	94,7%
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	107.903.294.000	103.259.949.332	95,7%
7	Harmonisasi Peraturan Penganggaran	2.914.738.000	2.710.127.729	93,0%

## C. KINERJA LAIN-LAIN

### 1. DJA Single Window

Berbekal semangat untuk membawa DJA ke arah yang lebih baik dari sisi internal dan melihat bahwa ada ruang untuk perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI), Direktur Jenderal Anggaran pada pertengahan 2015 mencetuskan wacana untuk membentuk wadah virtual yang bisa berfungsi untuk melayani pegawai sebagai *internal stakeholder* DJA. Kala itu yang menjadi perhatian utama beliau adalah sarana komunikasi virtual bagi para pegawai untuk saling berinteraksi, bertukar ide, untuk akhirnya berkolaborasi dalam menjalankan tugas, baik sebagai pegawai DJA sekaligus sebagai ASN.

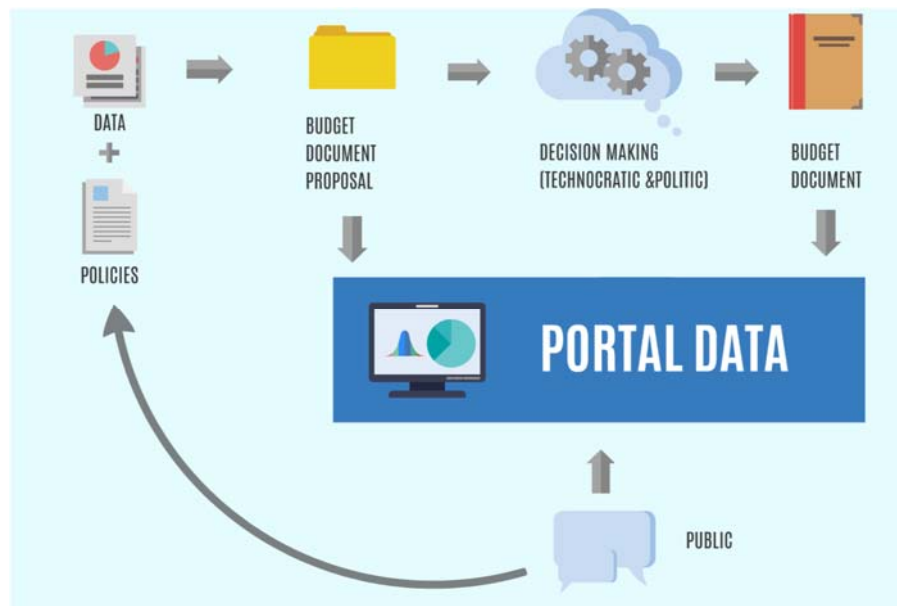


Ide tersebut ditangkap serta diproses secara serius oleh Bagian Ortala dari Sekretariat Direktorat Jenderal yang mengambil inisiatif untuk mencari bentuk dan mematangkan konsep dengan berkolaborasi dengan Subdit TIP dari Direktorat

Sistem Penganggaran sebagai pelaksana teknis. Diskusi-diskusi serta *brainstorming* yang ketat antara pihak-pihak tersebut melahirkan purwarupa perdana dari DSW (DJA *Single Windows*), sebuah aplikasi *platform* yang dirancang sebagai wadah virtual yang bisa diakses secara daring oleh pegawai DJA melalui jaringan intranet. Karena dirancang secara modular, *platform* ini bisa dijadikan sebagai pusat integrasi aplikasi-aplikasi yang selama ini digunakan oleh para pegawai DJA, aplikasi paling mutakhir yang terpasang dalam DSW ini adalah aplikasi MR.ARIS (Aplikasi pemesanan ruang rapat) yang notabene merupakan salah satu aplikasi pemenang lomba Inovasi pegawai DJA tahun 2016.

## 2. Portal Data APBN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, semakin dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan negara tersebut. Semangat tersebut seiring dengan amanat yang diinginkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Babak baru dalam publikasi data anggaran semakin terbuka setelah Direktur Jenderal Anggaran menandatangani *letter engagement* pada tanggal 24 Maret 2016. Salah satu point *letter engagement* menyebutkan komitmen Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan transparansi anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama di bidang transparansi anggaran semakin ditingkatkan, baik dengan lembaga di dalam negeri maupun organisasi internasional. Kantor Staf Kepresidenan dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) merupakan partner dalam meningkatkan transparansi APBN di Indonesia. Adapun kerja sama dengan lembaga luar negeri dilaksanakan dengan

menggandeng *Global Initiative for Fiscal Transparency* (GIFT), *International Budget Partnership* (IBP), dan *Open Government Partnership* (OGP).

Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan terus dilibatkan dalam pembahasan mengenai berbagai upaya dalam meningkatkan transparansi anggaran, partisipasi publik, dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan anggaran.

Portal data APBN nantinya akan menampilkan data series anggaran dari waktu ke waktu. Hal terpenting yang perlu dibangun dalam portal data APBN terletak pada kemudahan publik dalam mengakses portal data APBN (termasuk kemudahan untuk mengunduh data). Data yang tersaji dibuat sesederhana mungkin agar mudah dapat dimengerti oleh publik.

Tersedia data-data APBN per kategori yang dapat langsung diolah (ke dalam format excel) dan dokumen-dokumen terkait APBN, seperti Nota Keuangan dan APBN maupun *Budget in Brief*. Semua data dan informasi yang disajikan dimaksudkan untuk menambah pengetahuan pembaca terkait APBN di Indonesia. Tersedia juga infografis terkait APBN dalam bentuk visualisasi yang menarik dengan berbagai tema yang diangkat. Tema tersebut meliputi data anggaran untuk edukasi, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, kedaulatan pangan, belanja pemerintah pusat, dana transfer daerah dan dana desa.

#### Thematic Data



#### Infographics APBN



Disamping itu, keberadaan portal data APBN dimaksudkan untuk menyaring masukan dari khalayak umum guna tercipta APBN yang kredibel. Fasilitas portal ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses jalannya pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat bisa memberikan masukan dan koreksi kepada pemerintah demi terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Momen penyelenggaraan acara tahunan *Global Initiative for Fiscal Transparency* (GIFT) pada tanggal 13 September 2016 di Ballroom

Dhanapala menjadi momen pemerintah untuk *soft launching* portal data APBN. Acara *Soft launching* yang diikuti oleh partisipan dari berbagai negara tersebut diresmikan oleh Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan).

### 3. Olimpiade DJA Cerdas

Olimpiade DJA Cerdas adalah sebuah aplikasi kuis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai DJA mengenai tugas dan fungsi DJA. Dengan metode kuis, proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan, memberikan fleksibilitas waktu, yaitu bisa dilakukan di saat luang (misalnya saat istirahat jam kantor), sehingga tidak mengganggu kesibukan jam kerja pegawai, dan dapat dilakukan secara mandiri sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menghindari kejenuhan. Olimpiade DJA Cerdas merupakan salah satu inovasi pegawai DJA yang diajukan pada tahun 2015 dengan judul proposal Peningkatan Kapasitas melalui Kuis.



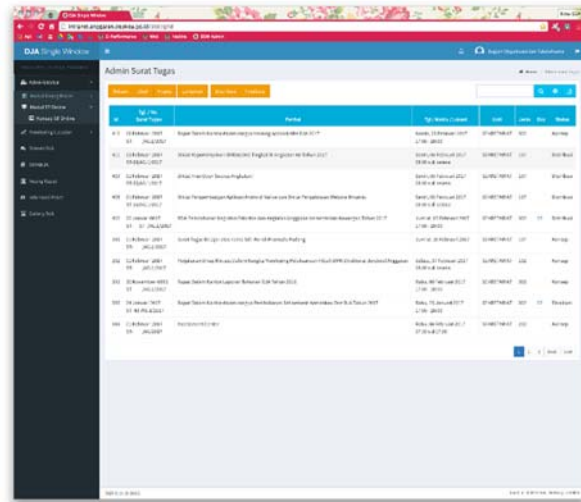
Inovasi ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah aplikasi dan selanjutnya disajikan pada DJA Single Window (DSW) pada tahun 2016 agar seluruh pegawai DJA dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut.

Olimpiade DJA Cerdas dapat diakses oleh seluruh pegawai DJA dan diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas DJA dan meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan peran dan fungsi DJA.

### 4. Penerapan Aplikasi Surat Tugas Online (ST Online)

Direktorat Jenderal Anggaran selalu melakukan berbagai bentuk perbaikan proses bisnis. Upaya tersebut juga bermuara pada kesinambungan serta peningkatan kapasitas organisasi. Untuk itu, DJA telah meluncurkan berbagai inovasi yang mengejawantahkan upaya tersebut.

Salah satu inovasi yang telah diluncurkan dan telah diterapkan adalah sebuah bentuk aplikasi berbasis web bernama *ST Online*. Cukup jelas dari nama aplikasi tersebut, *ST Online* merupakan aplikasi yang terintegrasi dalam *DJA Single Window* yang memfasilitasi proses bisnis penerbitan surat tugas. *ST Online* sendiri diterapkan mulai awal Januari 2017 di seluruh lingkup DJA.

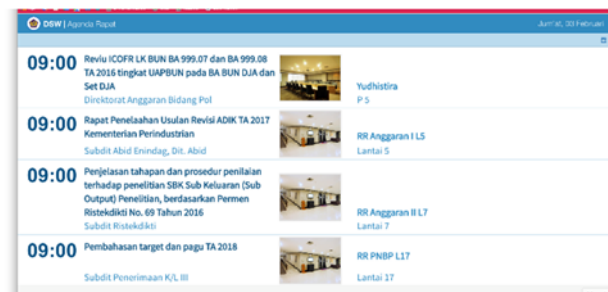


Berbagai fasilitas dalam aplikasi ini memberikan manfaat lebih kepada penggunanya, antara lain:

- Standardisasi format surat tugas;
- Notifikasi *realtime* melalui surat elektronik kepada para pegawai yang mendapatkan surat tugas;
- Memudahkan unit terkait dalam monitoring dan evaluasi atas penerbitan surat tugas dan pembayaran hak kepada para pegawai. Dengan kata lain, aplikasi ini membantu minimalisasi risiko surat tugas dan pembayaran ganda kepada pegawai.

## 5. Penerapan Aplikasi Pemesanan Ruang Rapat (MR. ARIS)

Selain *ST Online*, aplikasi berbasis web lainnya yang telah diterapkan adalah MR. ARIS. MR. ARIS sendiri merupakan singkatan dari *Meeting Room Arrangement Information System*. Aplikasi ini telah diterapkan mulai triwulan IV tahun 2016. Pada dasarnya aplikasi ini membantu penggunanya dalam mengatur jadwal pemakaian ruang rapat termasuk penyediaan konsumsinya. Pengguna dapat menentukan ruang rapat mana yang akan dipakai sesuai dengan ketersediaan serta kapasitas ruangan. Dalam hal konsumsi, pengguna dapat menentukan berapa jumlah yang dibutuhkan serta jenisnya. Melalui aplikasi MR. ARIS, penyediaan ruang rapat serta konsumsi menjadi lebih mudah, transparan, efektif, dan efisien.



Manfaat nyata yang dapat dirasakan melalui penerapan aplikasi MR. ARIS ini antara lain:

- Pegawai tidak perlu lagi membuat serta mencetak permintaan ruang rapat dan permintaan konsumsi rapat secara manual melalui nota dinas. Hal ini dapat

meningkatkan efisiensi, baik dari segi penggunaan ATK, maupun dari segi waktu (alur birokrasi).

- b. Ketersediaan ruang rapat dapat diakses secara terbuka dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara mandiri (*self-assessment* dan transparan).

## BAB IV PENUTUP

### A. Keberhasilan

Pencapaian kinerja DJA Pada tahun 2016 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kinerja DJA tahun 2016 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

- a. Nilai Kinerja Organisasi DJA Pada tahun 2016 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) mencapai 107,32%. Dari total 20 IKU, 19 IKU yang mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 IKU berstatus abu-abu. IKU “ Implementasi *reward and punishment* tidak diperhitungkan dalam perhitungan NKO sebagai implikasi dari ditetapkannya Undang-Undang 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 .
- b. Disamping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan DJA Pada tahun 2016, yaitu:
  - 1) Aplikasi DJA Single Window
  - 2) Portal Data APBN
  - 3) Aplikasi Pemesanan Ruang Rapat (MR. ARIS)
  - 4) Implementasi Surat Tugas (ST) Online
  - 5) Implementasi Quiz “Olimpiade DJA Cerdas”

### B. Strategi

Strategi yang akan ditempuh oleh DJA dalam rangka meningkatkan capaian IKU, pada tahun mendatang adalah:

- a. Perbaikan kebijakan peraturan di bidang penganggaran
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal DJA.
- c. Penyusunan dan perbaikan SOP layanan DJA.
- d. Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga.





# FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN 2016

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Anggaran  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	1a - CP Akurasi perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82
2.	Pemenuhan layanan publik	2a - CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06	4,2	103,45
3.	Sistem pelayanan PNBPN yang optimal	3a – N Persentase implementasi Single Source Database PNBPN	38%	38%	100%
4.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	4a – N Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	95%	100%	105,26
		4b – N Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80	93,37	116,71
5.	Kebijakan penganggaran yang berkualitas	5a–N Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran	83%	108,46%	120,00%
		5b–N Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75%	75%	100,00%
		5c–N Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	83%	108,46%	120,00%
6.	Penyusunan perencanaan anggaran yang akurat	6a–CP Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5%	2,63%	120,00%
		6b–N Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,5	8,83	120,00%
7.	Sistem penganggaran yang optimal	7a–N Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100,00%
		7b–N Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100	114,31	114,31%
		7c–N Penyelesaian implementasi RKA-K/L online	70%	72,41%	103,44%
8.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	8a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13%	107,94%
		8b–N Implementasi sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	N/A	N/A	N/A
9.	SDM yang kompetitif	9a – CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89%	99,02%	111,26%
10.	Organisasi yang kondusif	10b – CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94%
11.	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	11a – CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%	0,06%	120,00%
		11b – N Implementasi <i>E-government services</i>	100%	100%	100,00%
12.	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a – N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,33%	103,35%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2016 (setelah *selfblocking*)

: Rp139.592.329.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2016

: Rp133.934.885.372,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan Sumber Daya yang Berkualitas	1a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89%	99,02%	111,26%
2.	Pengelolaan Kelembagaan yang Efektif	2a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	117,65%
		2b-N Persentase penyelesaian penyempurnaan Proses Bisnis dan SOP DJA	100%	100%	100,00%
		2c-N Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil MOFIN	70%	100%	120,00%
3.	Pengelolaan Layanan Kesekretariatan yang berkualitas	3a-N Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100,00%
		3b-N Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian permintaan penyediaan informasi publik	100	113,85	113,85%
4.	Penyelenggaraan Pelaporan yang Berkualitas	4a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13%	107,94%
		4b-N Indeks Ketepatan waktu penyampaian data capaian IKU Kemenkeu- <i>Wide</i>	70	70	100,00%
		4c-N Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan DJA	3,2	3,4	106,25%
5.	SDM yang kompetitif	5a-N Persentase pemenuhan standar jamlat	100%	120%	120,00%
		5b-N Persentase penyelesaian rancangan pengembangan Jabatan Fungsional	100%	100%	100,00%
6.	Sistem informasi manajemen yang andal	6a-CP Implementasi <i>E-Government Services</i>	100%	100,00%	100,00%
7.	Organisasi yang kondusif	7a-N Tingkat penerapan pengendalian intern	2 (skala 3)	2	100,00%
8.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,87%	97,87%
		8b-N Indeks kualitas laporan keuangan BA 15	4 (WTP)	4	4

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (setelah *selfblocking*)

: Rp 107.903.294.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: Rp 103.259.949.332,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyusunan APBN

Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan anggaran yang berkualitas	1a-CP Akurasi perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82%
2.	Penyusunan anggaran yang transparan Penyusunan anggaran yang akurat	2a-N Indeks ketepatan waktu publikasi dokumen APBN	3	3,6	120,00%
		2b-N Pemenuhan informasi anggaran dalam dokumen APBN	100%	115%	115,00%
3.		3a-N Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	5%	5,00%	100,00%
4.	Perumusan proyeksi penyusunan APBN yang akurat	4a-N Deviasi perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah	5%	1,06%	120,00%
		4b-N Deviasi perumusan proyeksi belanja negara	5%	1,07%	120,00%
		4c-N Deviasi perumusan proyeksi pembiayaan anggaran	5%	1,08%	120,00%
5.	Harmonisasi kebijakan penganggaran yang berkualitas	5a-CP Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75%	75%	100,00%
6.	Penyelesaian dokumen APBN yang efektif	5b-CP Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	100%	100%	100,00%
		6a-N Indeks ketepatan waktu penyusunan dokumen NK dan RAPBN	3	3,2	106,67%
		6b-N Indeks ketepatan waktu penyusunan dokumen NK dan RAPBNP	3	3,2	106,67%
		6c-N Indeks ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Semester I Pelaksanaan APBN	3	3,6	120,00%
7.	Penyusunan laporan perkembangan APBN yang efektif	7a-N Persentase penyusunan laporan perkembangan realisasi APBN dan indikator ekonomi makro	100%	115%	115,00%
8.	SDM yang kompetitif	8a-N Persentase pemenuhan jmlat	100%	153%	120,00%
		8b-N Persentase penyelesaian kajian	100%	105%	105,00%
9.	Organisasi yang kondusif	9a-CP Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94%
10.	Pengelolaan anggaran yang optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,99%	104,20%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (setelah *selfblocking*) : Rp5.028.859.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp4.855.546.473,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Anggaran Bidang Ekonomi dan Kemaritiman  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan anggaran yang berkualitas	1a-CP Akurasi perencanaan APBN	95%	95,35%	100,37%
2.	Pemenuhan layanan publik	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06 (skala 5)	4,20	103,45%
		2b-N Persentase penyelesaian usulan persetujuan kontrak tahun jamak tepat waktu	100%	100%	100,00%
3	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	3a-CP Persentase penyusunan KPJM oleh penanggung jawab program	95%	95%	100,00%
		3b-CP Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80%	93,37%	116,71%
		3c-N Persentase implementasi standar biaya keluaran	15%	15%	100,00%
4.		4a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,50%	8,83%	120%
5.	Sistem penganggaran yang optimal	5a-CP Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100%
		5b-CP Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%
6.	SDM yang kompetitif	5c-CP Persentase Implementasi RKA-K/L <i>on line</i>	70%	70%	72,41%
		6a-N Persentase pemenuhan jmlat	100%	100%	100,00%
7.	Organisasi yang kondusif	6b-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100%	100,00%
		7a-CP Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan	87%	100%	114,94%
8.	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,656%	120,00%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (setelah *selfblocking*) : Rp2.605.020.000  
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp2.485.629.700,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan anggaran yang berkualitas	1a-CP Akurasi perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82
2	Pemenuhan layanan publik	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06 (skala 5)	4,20	103,45
3	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	3a-CP Persentase penyusunan KPJM oleh penanggung jawab program	95%	100%	105,26
		3b-CP Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80%	98,69%	120,00
		3c-N Persentase implementasi Standar Biaya Keluaran	15%	41,18%	120,00
4	Penyusunan anggaran yang akurat	4a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,5%	8,83%	120,00
5	Sistem penganggaran yang optimal	5a-CP Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100,00
		5b-CP Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100%	107,46%	107,46
		5c-CP Penyelesaian implementasi RKA-K/L <i>online</i>	70%	72,41%	103,44
6	SDM yang kompetitif	6a-N Persentase pemenuhan jamlat	100%	100%	100,00
		6b-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100%	100,00
7	Organisasi yang kondusif	7a-CP Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94
8	Pengelolaan anggaran yang optimal	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,46%	104,69

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (setelah *selfblocking*) : Rp 2.605.020.000,-  
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp 2.485.629.700,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan anggaran yang berkualitas	1a-CP Akurasi perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82
2.	Pemenuhan layanan publik	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06 (skala 5)	4,20	103,45
3.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	3a-CP Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	95%	100%	105,26
		3b-CP Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80%	98,69%	120,00
		3c-N Persentase implementasi Standar Biaya Keluaran	15%	33,33%	120,00
4.	Penyusunan anggaran yang akurat	4a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L	12,5%	8,83%	120,00
		4b-N Persentase ketepatan waktu penyelesaian SP DIPA	100%	100%	100,00
5.	Sistem penganggaran yang optimal	5a-CP Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100,00
		5b-CP Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100%	113,46%	113,46
		5c-CP Persentase implementasi RKA K/L <i>online</i>	70%	72,41%	103,44
6.	Perencanaan dan pengelolaan penganggaran BA BUN yang efektif	6a-N Persentase PMK tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban anggaran BA BUN yang tersaji	100%	100%	100,00
		6b-N Persentase ketepatan waktu penyelesaian SP DIPA BUN	100%	115,76%	115,76
7.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	7a-CP Presentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13%	107,94
		7b-N Persentase rekomendasi Aparat Pemeriksa Fungsional yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100,00
8.	SDM yang kompetitif	8a-N Persentase pemenuhan standar jamlat	100%	100%	100,00
		8b-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100%	100,00
9.	Organisasi yang kondusif	9a-CP Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94
10.	Pengelolaan anggaran yang optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,46%	104,69

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (setelah *selfblocking*) : Rp2.291.832.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp2.249.948.135,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan anggaran yang berkualitas	1a-CP Akurasi Perencanaan APBN	95%	96,73%	101,82%
		1b-N Jumlah Penerimaan PNBPN	Rp273,8T	262,07	106,93%
2.	Sistem pelayanan PNBPN yang optimal	2a-CP Persentase implementasi <i>Single Source Database</i> PNBPN	38%	38,00%	100,00%
3.	Pemenuhan layanan publik	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,06 (skala 5)	4,20	103,45%
4.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	4a-N Tingkat kepatuhan Stakeholders dalam melaksanakan peraturan PNBPN dan Subsidi Energi	95%	100,00%	105,26%
5.	Kajian dan rumusan kebijakan yang berkualitas	5a-N Persentase penyelesaian jumlah peraturan di bidang PNBPN dan Subsidi Energi	100%	126%	120,00%
		5b-N Persentase penyelesaian jumlah PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN	100%	100%	100,00%
		5c-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100%	100,00%
6.	Penyusunan anggaran yang akurat	6a-CP Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	5%	2,62%	120,00%
7.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13	107,94%
		7b-N Persentase rekomendasi Aparat Pemeriksa yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%
8.	SDM yang kompetitif	8a-N Persentase pegawai Direktorat PNBPN yang telah memenuhi jam latihan	100%	100,00%	100,00%
9.	Organisasi yang kondusif	9a-CP Persentase implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94%
10.	Sistem manajemen informasi yang andal	10a-CP Tingkat <i>down time</i> sistem TIK	1%	0,06	120,00%
11.	Pengelolaan anggaran yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,42%	104,65%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp3.733.189.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp3.647.134.735,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Sistem Penganggaran

Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sistem penganggaran yang optimal	1a-CP Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	101,29
		1b-CP Persentase implementasi penelaahan RKA-K/L <i>online</i>	70%	72,41%	101,29
		1c-N Persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/norma penganggaran	100%	100%	101,27
2.	Kebijakan penganggaran yang berkualitas	2a-N Persentase implementasi standar biaya keluaran	15%	25,29%	120
3.	Pemenuhan layanan publik	3a-N Persentase Dukungan IT yang memadai	100%	100%	100
4.	Sistem pelayanan PNBPN yang optimal	4a-N Pengintegrasian aplikasi SIMPONI dengan sistem informasi K/L	5	5	100
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	5a-N Persentase penyusunan konsep penyempurnaan kualitas KPJM	100%	100%	109,62
		5b-CP Persentase satker yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	80%	93,37	109,62
6.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13	104,45
		6b-CP Persentase penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja	100%	100%	100
7.	SDM yang kompetitif	7a-N Persentase pemenuhan standar jamlat	100%	100%	100
		7b-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100%	100
8.	Organisasi yang kondusif	8a-CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100%	114,94
9.	Sistem informasi manajemen yang andal	9a-CP Tingkat <i>down time</i> sistem TIK	1%	0,065	120
		9b-CP Implementasi <i>E-government services</i>	100%	100%	110
10.	Pengelolaan anggaran yang optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,44%	103,62

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: Rp5.771.094.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: Rp5.464.455.000,-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran  
 Tahun Anggaran : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemenuhan layanan publik	1a-N Dukungan harmonisasi penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBPK/L	100%	100,00%	100,00%
2.	Harmonisasi kebijakan penganggaran yang berkualitas	2a-CP Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran	83%	108,46%	120,00%
		2b-CP Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	75%	75%	100,00%
		2c-CP Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	100%	100%	100,00%
3.	Monitoring dan evaluasi yang efektif	3a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	52%	56,13%	107,94%
4.	Organisasi yang kondusif	4a-CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	87%	100,00%	114,94%
5.	Pengelolaan anggaran yang optimal	5a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,56%	100,59%
6.	SDM yang kompetitif	6a-N Persentase penyelesaian kajian	100%	100	100,00%
		6b-N Persentase pemenuhan jamlat	100%	100,00%	100,00%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp2.914.738.000,-  
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp2.710.127.729,-

